



# RENCANA KONTINJENSI

---

# ANCAMAN GEMPA-TSUNAMI

---

NAGARI AMPING PARAK,  
KECAMATAN SUTERA,  
KABUPATEN PESISIR SELATAN



# KATA PENGANTAR

Puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan nikmat dan karunia-Nya sehingga kita dapat menyelesaikan amanah yang diberikan dalam menyusun Dokumen Rencana Kontijensi (Renkon) Ancaman Bencana Gempa Bumi Berpotensi Tsunami Nagari Ampiang Parak Kecamatan Sutera Kabupaten Pesisir Selatan.

Dokumen ini berisi tentang Rencana Kontijensi Ancaman Bencana Gempa Bumi Berpotensi Tsunami Nagari Ampiang Parak yang disusun oleh Pemerintah Nagari, dan masyarakat melalui Forum Pengurangan Risiko Bencana Nagari Ampiang Parak bersama Perwakilan Tim Penanggulangan Bencana serta kelompok berisiko dengan difasilitasi melalui program Peningkatan Kapasitas Pengurangan Risiko Bencana dan Ketangguhan Desa Pesisir di Sumatera Barat Periode 2016 - 2019 dalam kerangka Pelaksanaan Program Nasional Desa/Kelurahan Tangguh Bencana yang dilaksanakan oleh Lembaga Arbeiter Samariter Bund Indonesia and the Philipphines bekerjasama dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai dengan dukungan Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat dan Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia, serta dukungan pendanaan dari Kementerian Luar Negeri Jerman (*German Humanitarian Assistance*).

Kami menyadari bahwa dokumen yang kami susun bersama ini masih jauh dari sempurna, oleh karena itu kami sangat berterima kasih kepada pihak-pihak yang memberikan kritik dan saran membangun dalam penyempurnaan dokumen ini.

Ucapan terima kasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya pada seluruh komponen masyarakat dan pemerintah di Nagari Ampiang Parak yang telah menunjukkan antusiasme dan komitmen yang tinggi dalam pelaksanaan program ini dari awal sampai akhir. Semoga dokumen Renkon Nagari Ampiang Parak ini bermanfaat bagi masyarakat, Pemerintah Nagari, Pemerintah Kabupaten, Pemerintah Provinsi dan pihak-pihak lain yang memerlukan dalam rangka penanggulangan bencana dan meningkatkan ketangguhan masyarakat berprinsip inklusi.

Ampiang Parak, Maret 2018  
Ketua Forum Pengurangan Risiko Bencana  
Nagari Ampiang Parak

# DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	ii
DAFTAR GAMBAR.....	iii
DAFTAR TABEL.....	iv
BAB I PENDAHULUAN .....	1
A. LATAR BELAKANG.....	1
B. TUJUAN.....	2
C. RUANG LINGKUP.....	2
D. SIFAT RENCANA KONTIJENSI.....	2
E. AKTIVASI RENCANA KONTIJENSI.....	2
F. KEDUDUKAN DOKUMEN.....	3
G. PEMUTAKHIRAN.....	3
H. LANDASAN HUKUM.....	3
I. PENGERTIAN.....	5
BAB II GAMBARAN UMUM KEBENCANAAN .....	12
A. SEJARAH TERBENTUKNYA NAGARI AMPIANG PARAK .....	12
B. GAMBARAN UMUM NAGARI .....	14
C. GAMBARAN SEJARAH KEBENCANAAN NAGARI AMPIANG PARAK.....	15
D. GAMBARAN SUMBER DAYA NAGARI AMPIANG PARAK .....	17
E. PENILAIAN RISIKO.....	20
BAB III PENGEMBANGAN SKENARIO.....	22
A. PENENTUAN KEJADIAN.....	23
B. SKENARIO DAMPAK BENCANA.....	25
C. STANDART PELAYANAN OPERASI TANGGAP DARURAT .....	33
BAB IV PERENCANAAN OPERASI .....	36
A. SASARAN DAN STRATEGI OPERASI TANGGAP DARURAT .....	36
B. STRUKTUR KOORDINASI PENANGANAN DARURAT .....	38
C. FASILITAS OPERASI PENANGANAN DARURAT .....	40
D. REKAPITULASI KEBUTUHAN REGU, KESENJANGAN DAN MOBILISASI SUMBER DAYA.....	41
BAB V SISTEM PERINGATAN DINI DAN PROSEDUR TETAP .....	50
A. PENGERTIAN.....	50
B. SKEMA PERINGATAN DINI BERBASIS MASYARAKAT .....	51
C. PROSESDUR TETAP GEMPA BUMI BERPOTENSI TSUNAMI .....	54
BAB VI PEMANTAUAN DAN RENCANA TINDAK LANJUT .....	57
BAB VII PENUTUP .....	58
LAMPIRAN .....	59

# DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.	Peta Administratif Nagari Ampiang Parak .....	3
Gambar 2.	Matriks Tingkat Keterpaparan Nagari Ampiang Parak .....	21
Gambar 3.	Matriks Tingkat Risiko Ancaman Bencana Nagari Ampiang Parak .....	22
Gambar 4.	Perkiraan Sumber Gempa Yang Berpotensi Terjadi di Masa Datang .....	23
Gambar 5.	Struktur Koordinasi Penanganan Darurat Bencana Nagari Ampiang Parak .....	35
Gambar 6.	Skema Peringatan Dini berbasis Masyarakat di Nagari Ampiang Parak .....	44
Gambar 7.	Peta Risiko Ancaman Gempa Bumi Nagari Ampiang Parak .....	53
Gambar 8.	Peta Risiko Ancaman Gempa Bumi Nagari Ampiang Parak .....	54

# DAFTAR TABEL

Tabel 1. Jumlah Penduduk Nagari Ampiang Parak.....	15
Tabel 2. Jumlah Penduduk Berisiko di Nagari Ampiang Parak .....	16
Tabel 3. Persebaran Penyandang Disabilitas Berdasarkan Kategori Hambatan .....	17
Tabel 4. Identifikasi Sejarah Kebencanaan di Nagari Ampiang Parak.....	18
Tabel 5. Gambaran Umum Sumber Daya Nagari Ampiang Parak .....	19
Tabel 6. Sumber Daya Manusia dan Kelembagaan Nagari Ampiang Parak .....	20
Tabel 7. Kronologis Penentuan Kejadian Bencana Gempabumi Berpotensi Tsunami.....	24
Tabel 8. Dampak Bencana Gempabumi Berpotensi Tsunami Nagari Ampiang Parak .....	25
Tabel 9. Fasilitas/Aset yang Rusak atau Tidak Berfungsi Akibat Tsunami .....	26
Tabel 10. Aspek Ekonomi yang Rusak atau Tidak Berfungsi Akibat Tsunami.....	27
Tabel 11. Aspek Lingkungan yang Rusak Akibat Tsunami di Nagari Ampiang Parak .....	28
Tabel 12. Aspek Pemerintahan yang Rusak atau Tidak Berfungsi Akibat Tsunami .....	29
Tabel 13. Standar Kualitas Pelayanan Minimum Operasi Darurat Bencana.....	30
Tabel 14. Jenis Kegiatan Operasi dan Pembagian Peran dan Tugas Pelaku Operasi .....	31
Tabel 15. Sasaran Umum Keselamatan Jiwa .....	32
Tabel 16. Sasaran Umum Stabilitas Keadaan Darurat.....	33
Tabel 17. Sasaran Umum Pemeliharaan/Pengamanan Properti/Aset.....	34
Tabel 18. Sumberdaya Kebutuhan, Kesenjangan dan Mobilisasi Regu Penyuluh .....	38
Tabel 19. Sumberdaya Kebutuhan, Kesenjangan dan Mobilisasi Regu SAR .....	39
Tabel 20. Sumberdaya Kebutuhan, Kesenjangan dan Mobilisasi Regu PPGD .....	40
Tabel 21. Sumberdaya Kebutuhan, Kesenjangan dan Mobilisasi Regu Logistik & Dapur ....	41
Tabel 22. Sumberdaya Kebutuhan, Kesenjangan dan Mobilisasi Regu Pendataan Cepat ..	42
Tabel 23. Sistem Peringatan Dini Berbasis Masyarakat dan Berprinsip Inklusi .....	45
Tabel 24. Prosedur Tetap Tindakan Pengurangan Risiko Dampak Ancaman Bencana Gempa Bumi Berpotensi Tsunami.....	47

# I PENDAHULUAN

## A. LATAR BELAKANG

Nagari Ampiang Parak adalah sebuah nagari yang terletak di Kecamatan Sutera, Kabupaten Pesisir Selatan. Berdasarkan kondisi alam, Nagari Ampiang Parak sangat rentan terhadap kejadian bencana gempabumi, banjir, tanah longsor, epidemi dan wabah penyakit, gelombang ekstrim dan abrasi, cuaca ekstrim, kebakaran hutan dan lahan serta bencana konflik sosial.

Beragamnya potensi bencana yang mungkin terjadi di Nagari Ampiang Parak, maka diperlukan usaha yang serius melalui koordinasi seluruh pemangku kepentingan untuk mengurangi risiko bencana yang mungkin terjadi. Upaya yang dapat dilakukan mencakup peningkatan kapasitas sumberdaya dari seluruh pemangku kepentingan dan pengurangan kerentanan dari aspek sosial budaya, ekonomi, fisik, dan lingkungan di Nagari Ampiang Parak.

Untuk menghadapi berbagai ancaman yang ada, maka Tim PB Nagari, FPRB Nagari dan Pemerintah Nagari Ampiang Parak menyusun dokumen rencana Kontinjensi. Rencana Kontinjensi ini diharapkan dapat digunakan sebagai pedoman bagi pemerintah Nagari Ampiang Parak dan pelaku penanggulangan bencana di desa untuk menyelenggarakan kegiatan tanggap darurat. Rencana Kontinjensi ini memuat tentang kebijakan dan strategi serta langkah-langkah operasional dalam menghadapi situasi darurat sehingga saat situasi darurat, para pelaku penanggulangan bencana di Nagari Ampiang Parak dapat melaksanakan peran, tugas dan fungsi mereka masing-masing sesuai dengan yang disepakati saat penyusunan rencana Kontinjensi ini.

Berdasarkan hasil kajian risiko bencana, disepakati dan prioritaskan untuk melakukan penyusunan Dokumen Rencana Kontinjensi dalam menghadapi bencana *Gempabumi Berpotensi Tsunami*. Rencana Kontinjensi yang disusun akan memuat tentang kebijakan dan strategi serta langkah-langkah operasional dalam menghadapi situasi tanggap darurat. Dengan demikian, pelaku penanggulangan bencana di Nagari Ampiang Parak dapat mengerti dan memahami peran, tugas dan fungsi mereka masing-masing sesuai dengan yang disepakati saat penyusunan rencana Kontinjensi ini. Sehingga penyelenggaraan kegiatan tanggap darurat akan lebih terpadu dan terkoordinir dengan baik. Hal ini merupakan mandat dari Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana.

## B. TUJUAN

Dokumen Rencana Kontinjensi Nagari Ampiang Parak ditujukan untuk menjadi landasan operasional, strategi dan pedoman dalam proses penanganan tanggap darurat bencana gempa bumi berpotensi tsunami secara mandiri ditingkat desa. Dengan demikian semua pihak mampu mengupayakan pengelolaan tanggap darurat bencana yang ada ditingkat Nagari Ampiang Parak secara cepat, feketif, terstruktur, menyeluruh, terpadu, terkoordinir, terarah

dan juga secara inklusif. Selain itu Rencana Kontijensi ini juga sebagai dasar mobilisasi sumber daya para pemangku kepentingan (*stakeholders*) yang mengambil peran dalam penyusunan rencana kontijensi.

### **C. RUANG LINGKUP**

Dokumen Rencana Kontinjensi Gempa Bumi Berpotensi Tsunami Nagari Ampiang Parak ini merupakan dokumen perencanaan kesiapsiagaan tanggap darurat yang memuat kebijakan, strategi, manajemen, koordinasi dan perencanaan sektoral dalam menghadapi situasi darurat akibat gempabumi yang berpotensi tsunami di wilayah Nagari Ampiang Parak. Bilamana terjadi bencana akibat ancaman gempabumi yang diikuti tsunami di Nagari Ampiang Parak maka Rencana Kontinjensi dapat berubah menjadi Rencana Operasi Tanggap Darurat.

### **D. SIFAT RENCANA KONTIJENSI**

Dokumen rencana kontinjensi ancaman gempa bumi berpotensi tsunami Nagari Ampiang Parak ini bersifat:

1. Partisipatif, disusun oleh multi sektor dan multi pihak serta melibatkan kelompok berisiko termasuk penyandang disabilitas.
2. Berprinsip inklusif.
3. Dinamis dan selalu *up to date*.

Dokumen Rencana Kontijensi ini juga mengacu pada dokumen Rencana Kontijensi yang telah disusun oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan dan juga dokumen Rencana Kontijensi yang di susun oleh Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat.

### **E. AKTIVASI RENCANA KONTIJENSI**

Rencana kontijensi ini akan diaktifkan bila ancaman bencana gempa bumi berpotensi tsunami benar-benar terjadi dan tetap mengacu pada kebijakan pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan tentang situasi kebencanaan yang terjadi. Sehingga untuk mengaktifkannya berdasarkan kondisi:

1. Jika bencana gempa bumi berpotensi tsunami terjadi dan berdampak pada Nagari Ampiang Parak, maka rencana kontijensi diaktifkan menjadi rencana operasi setelah ada penetapan status keadaan darurat bencana gempa bumi diikuti tsunami oleh Bupati Kabupaten Pesisir Selatan. Rencana kontijensi ini diaktifkan dalam rapat penyusunan rencana operasi yang dipimpin oleh Wali Nagari dengan didampingi oleh Ketua BAMUS dan Ketua/Koordinator Tim PB/KSB tingkat Nagari Ampiang Parak.
2. Setelah ada peringatan dan informasi dari Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) dan atau BPBD atau pihak berwenang lainnya yang menyatakan bahwa landaan tsunami telah berakhir atau keadaan telah dinyatakan aman.

## **F. KEDUDUKAN DOKUMEN**

Dokumen Rencana Kontinjensi Gempabumi Berpotensi Tsunami Nagari Ampiang Parak menjadi salah satu acuan dalam perumusan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Nagari Ampiang Parak pada prioritas penyelenggaraan pembangunan dan upaya kesiapsiagaan bencana Nagari Ampiang Parak yang terintegrasi. Dokumen ini juga menjadi acuan dalam kegiatan gladi/simulasi gempabumi berpotensi tsunami yang diselenggarakan di Nagari Ampiang Parak.

## **G. PEMUTAKHIRAN**

Jika dalam 2 (dua) tahun setelah dokumen ini disusun dan disahkan tidak terjadi bencana gempa bumi yang berpotensi tsunami, maka harus dilakukan kaji ulang dan pemutakhiran data, informasi dan kondisi kebencanaan guna penyesuaian Rencana Kontinjensi.

## **H. LANDASAN HUKUM**

Rencana Kontinjensi (Renkon) Gempabumi berpotensi Tsunami Nagari Ampiang Parak mempunyai landasan hukum ini sebagai berikut:

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723).
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829).
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2008 tentang Peran Serta Lembaga Internasional dan Lembaga Asing Non Pemerintah Dalam Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 44 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4830).
4. Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Dalam Keadaan Tertentu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 34);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewaspadaan Dini Masyarakat;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyiapan Sarana dan Prasarana Dalam Penanggulangan Bencana;
7. Peraturan Kepala BNPB Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana;
8. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pedoman Tata Cara Pemberian Bantuan Kebutuhan Dasar;
9. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 18 Tahun 2010 tentang Pedoman Distribusi Bantuan Logistik Dan Peralatan Penanggulangan Bencana;
10. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 24 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Operasi Darurat Bencana;

11. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 8 Tahun 2011 tentang Standarisasi Data Kebencanaan;
12. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 17 Tahun 2011 tentang Pedoman Relawan Penanggulangan Bencana;
13. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pedoman Umum Desa/Kelurahan Tangguh Bencana;
14. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pedoman Umum Pengkajian Risiko Bencana;
15. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 3 Tahun 2012 tentang Panduan Penilaian Kapasitas Daerah Dalam Penanggulangan Bencana;
16. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 11 Tahun 2014 tentang Peran Serta Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana;
17. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 12 Tahun 2014 tentang Peran Serta Lembaga Usaha dalam Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana;
18. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 13 Tahun 2014 tentang Pengarusutamaan Gender di Bidang Penanggulangan Bencana;
19. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 14 Tahun 2014 tentang Penanganan, Perlindungan Dan Partisipasi Penyandang Disabilitas Dalam Penanggulangan Bencana;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Struktur Organisasi Pemerintah Desa;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa;
22. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 3 Tahun 2016 tentang Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana;
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa;
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2016 tentang Administrasi Pemerintahan Desa;
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2017 tentang Standar Pelayanan Minimal Desa;
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
27. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 3 Tahun 2018 tentang Penanganan Pengungsi Pada Keadaan Darurat Bencana;
28. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 4 Tahun 2018 tentang Sistem Manajemen Logistik Dan Peralatan;
29. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 5 Tahun 2018 tentang Kondisi dan Tata Cara Pelaksanaan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Dalam Keadaan Tertentu;
30. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2018 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2019;



31. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 5 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2007 Nomor 5);
32. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 9 Tahun 2009 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Badan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2009 Nomor 9);
33. Keputusan Gubernur Sumatera Barat Nomor 360-184-2015 tentang Pembentukan Satuan Tugas Pengendali Operasi Penanggulangan Bencana Pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Sumatera Barat;
34. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 3 Tahun 2010 tentang Penanggulangan Bencana di Kabupaten Pesisir Selatan;
35. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pokok-Pokok Nagari;
36. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 3 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2016-2021;
37. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pemerintahan Nagari dalam Wilayah Kabupaten Pesisir Selatan;
38. Peraturan Desa Nomor 01 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Nagari Ampiang Parak tahun 2017 - 2023;

## I. PENGERTIAN

Untuk memahami Dokumen Rencana Kontinjensi Bencana Gempabumi Berpotensi Tsunami Nagari Ampiang Parak, disajikan beberapa pengertian kata dan kelompok kata sebagai berikut:

1. **Aksesibilitas** adalah derajat kemudahan dicapai oleh orang terhadap suatu objek, pelayanan ataupun lingkungan. Kemudahan akses tersebut diimplementasikan pada keterlibatan, peran, penerimaan informasi, layanan publik, bangunan gedung, lingkungan dan fasilitas umum lainnya.
2. **Alat Bantu** adalah benda yang berfungsi membantu kemandirian Penyandang Disabilitas dalam melakukan kegiatan sehari-hari.
3. **Alokasi Dana Desa** yang selanjutnya disingkat ADD adalah dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
4. **Aset Desa** adalah barang milik Desa yang berasal dari kekayaan asli Desa, dibeli atau diperoleh atas beban APB Desa atau perolehan hak lainnya yang sah.
5. **Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah** adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten dan Provinsi.

6. **Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa** yang selanjutnya disebut APB Desa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
7. **Badan Penanggulangan Bencana Daerah**, yang selanjutnya disingkat BPBD, adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah/Organisasi Perangkat Daerah (SKPD/OPD) Pemerintah Daerah yang melakukan penyelenggaraan penanggulangan bencana di daerah.
8. **Bahaya** adalah situasi, kondisi, atau karakteristik biologis, klimatologis, geografis, geologis, sosial, ekonomi, politik, budaya, dan teknologi suatu masyarakat disuatu wilayah untuk jangka waktu tertentu yang berpotensi menimbulkan korban dan kerusakan
9. **Bencana** adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan atau faktor non alam maupun faktor manusia, sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda dan dampak psikologis.
10. **Bencana alam** adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam antara lain berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin puting beliung, dan tanah longsor.
11. **Bencana non alam** adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau rangkaian peristiwa non alam yang antara lain berupa gagal teknologi, gagal modernisasi, epidemi dan wabah penyakit.
12. **Bencana Sosial** adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang diakibatkan oleh manusia yang meliputi antara lain konflik sosial antar kelompok atau antar komunitas masyarakat dan teror.
13. **Barang Milik Desa** adalah kekayaan milik Desa berupa barang bergerak dan barang tidak bergerak.
14. **Data dan Informasi Bencana Indonesia**, selanjutnya disebut DIBI, adalah sebuah perangkat aplikasi analisis yang digunakan untuk menyimpan data bencana serta mengelola data spasial maupun data nonspasial baik bencana skala kecil maupun bencana dalam skala besar terdapat banyak.
15. **Daerah rawan bencana** adalah daerah yang memiliki kondisi atau karakteristik geologis, hidrologis, klimatologis, geografis, sosial, budaya, politik, ekonomi, dan teknologi pada suatu wilayah dalam jangka waktu tertentu untuk mengurangi kemampuan dan menanggapi dampak buruk bahaya tertentu.
16. **Dana Desa** adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan masyarakat, dan pemberdayaan masyarakat.
17. **Desa Tangguh Bencana** adalah desa yang memiliki kemampuan mandiri untuk siap siaga, beradaptasi dan menghadapi potensi ancaman bencana, serta memulihkan diri dengan segera dari dampak-dampak bencana yang merugikan.
18. **Desa Tangguh Bencana Inklusi** adalah program pengembangan Desa Tangguh Bencana menerapkan prinsip pelibatan semua pihak, dengan mengakomodasi sumber-

sumber daya dari berbagai kelompok di dalam maupun di luar desa sebagai bagian dari jaringan sosial komunitas desa yang berdasarkan solidaritas dan kerelawanan.

19. **Disabilitas** adalah konsep disabilitas terus berkembang. Dalam hal ini disabilitas merupakan hasil interaksi antara individu yang memiliki keterbasan fisik dengan sikap serta lingkungan yang menghambat partisipasi penuh dan efektif mereka di dalam masyarakat berdasarkan asas kesetaraan dengan masyarakat lainnya.
20. **Fokus Prioritas** adalah kegiatan yang menjadi prioritas dilakukan oleh pemerintah desa dalam penanggulangan satu bencana atau multibencana.
21. **Forum Pengurangan Risiko Bencana Nagari Ampiang Parak**, selanjutnya disingkat Forum PRB Nagari Ampiang Parak, adalah wadah yang menyatukan organisasi dan kelompok pemangku kepentingan di Nagari Ampiang Parak, yang bergerak dalam mendukung upaya-upaya pengurangan risiko bencana guna mewujudkan desa tangguh inklusif.
22. **Gagal Teknologi** adalah semua kejadian bencana yang diakibatkan oleh kesalahan disain, pengoperasian, kelalaian, dan kesengajaan manusia dalam penggunaan teknologi dan/atau industri.
23. **Inklusi** adalah sebuah pendekatan untuk membangun dan mengembangkan sebuah lingkungan yang semakin terbuka; mengajak masuk dan mengikutsertakan semua orang dengan berbagai perbedaan latar belakang, karakteristik, kemampuan, status, kondisi konflik, etnik, budaya dan lainnya. Sifat suatu kegiatan yang inklusi disebut inklusif.
24. **Inklusi Sosial** adalah tindakan atau proses mengupayakan sebuah kondisi yang mana setiap individu atau kelompok masyarakat dapat mengambil peran sosial dalam rangka meningkatkan kapasitas, memperluas kesempatan dan menjamin martabat masyarakat, utamanya masyarakat yang terpinggirkan dikarenakan identitas individu mereka.
25. **Kajian Risiko Bencana** yang selanjutnya disingkat **KRB** adalah mekanisme terpadu untuk memberikan gambaran menyeluruh terhadap risiko bencana suatu daerah dengan menganalisis tingkat ancaman, tingkat kerugian, dan kapasitas daerah dalam bentuk tertulis dan peta.
26. **Kapasitas** adalah penguasaan sumberdaya, cara dan ketahanan yang dimiliki pemerintah dan masyarakat yang memungkinkan mereka untuk mempersiapkan diri, mencegah, menjinakkan, menanggulangi, mempertahankan diri serta dengan cepat memulihkan diri dari akibat bencana.
27. **Kegiatan pencegahan bencana** adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan sebagai upaya untuk menghilangkan dan atau mengurangi ancaman bencana.
28. **Kelompok rentan atau berisiko tinggi** adalah bayi, anak usia di bawah lima tahun, anak-anak, ibu hamil atau menyusui, penyandang disabilitas dan orang lanjut usia.
29. **Kemudahan akses** adalah kemudahan yang disediakan bagi Penyandang Disabilitas guna mewujudkan kesamaan kesempatan dalam segala aspek kehidupan dan penghidupan.

30. **Kerentanan** adalah tingkat kekurangan kemampuan suatu masyarakat untuk mencegah, menjinakkan, mencapai kesiapan, dan menanggapi dampak ancaman tertentu. Kerentanan berupa kerentanan sosial budaya, fisik, ekonomi dan lingkungan, yang dapat ditimbulkan oleh beragam penyebab.
31. **Kerugian** adalah tingkat kekurangan kemampuan suatu masyarakat untuk mencegah, menjinakkan, mencapai kesiapan, dan menanggapi dampak ancaman tertentu. Kerugian berupa kerugian sosial budaya, fisik, ekonomi, dan lingkungan yang dapat ditimbulkan oleh beragam penyebab.
32. **Kesamaan Kesempatan** adalah keadaan yang memberikan peluang dan/atau menyediakan akses kepada Penyandang Disabilitas untuk menyalurkan potensi dalam segala aspek penyelenggaraan negara dan masyarakat.
33. **Kesiapsiagaan** adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mengantisipasi bencana melalui pengorganisasian serta melalui langkah yang tepat guna dan berdaya guna.
34. **Korban Bencana** adalah orang atau kelompok orang yang menderita atau meninggal dunia akibat bencana.
35. **Korban tidak langsung** adalah orang yang tidak terkena bencana secara langsung, yaitu orang yang bertalian darah dengan derajat satu atau yang bergantung hidup dari korban bencana.
36. **Lembaga usaha** adalah setiap badan hukum yang dapat berbentuk badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, koperasi, atau swasta yang didirikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang menjalankan jenis usaha tetap dan terus menerus yang bekerja dan berkedudukan dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
37. **Mandat Inklusi** adalah prinsip-prinsip dasar dan praktis dalam mengupayakan inklusi penyandang disabilitas dalam upaya pembangunan termasuk dalam isu PRB yang mencakup ketersediaan data terpilah, aksesibilitas, partisipasi bermakna, prioritas perlindungan dan peningkatan kapasitas.
38. **Mitigasi** adalah upaya yang dilakukan untuk mengurangi risiko bencana dengan menurunkan kerugian dan/atau meningkatkan kemampuan menghadapi ancaman bencana.
39. **Mitigasi Fisik** adalah upaya dilakukan untuk mengurangi risiko bencana dengan menurunkan kerugian dan/atau meningkatkan kemampuan menghadapi ancaman bencana dengan membangun infrastruktur.
40. **Mitigasi Non-Fisik** adalah upaya yang dilakukan untuk mengurangi risiko bencana dengan menurunkan kerugian dan/atau meningkatkan kemampuan menghadapi ancaman bencana dengan meningkatkan kapasitas pemerintah dan masyarakat dalam menghadapi bencana.
41. **Pengungsi** adalah orang atau sekelompok orang yang terpaksa atau dipaksa keluar dari tempat tinggalnya sebagai akibat buruk bencana.

42. **Penyintas** adalah korban yang selamat dan mampu bangkit kembali.
43. **Peraturan Nagari** adalah Peraturan Nagari Ampiang Parak yang merupakan perundang-undangan yang dibuat oleh BAMUS Ampiang Parak bersama Wali Nagari Ampiang Parak.
44. **Peringatan Dini** adalah upaya pemberian peringatan sesegera mungkin kepada masyarakat tentang kemungkinan terjadinya bencana pada suatu tempat oleh lembaga yang berwenang.
45. **Pengurangan Risiko Bencana** adalah segala tindakan yang dilakukan untuk mengurangi kerugian dan meningkatkan kapasitas terhadap jenis ancaman tertentu atau mengurangi potensi jenis ancaman tertentu.
46. **Penanggulangan Bencana** adalah upaya yang meliputi penetapan kebijakan pembangunan yang berisiko timbulnya bencana, pencegahan bencana, mitigasi bencana, kesiapsiagaan, tanggap darurat, rehabilitasi, dan rekonstruksi.
47. **Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana** adalah serangkaian upaya yang meliputi penetapan kebijakan pembangunan yang berisiko timbulnya bencana, kegiatan pencegahan bencana, tanggap darurat dan rehabilitasi.
48. **Pusdalops Penanggulangan Bencana**, yang selanjutnya disingkat **Pusdalops PB** adalah Unsur Pelaksana Operasional pada Pemerintah Pusat dan Daerah, yang bertugas memfasilitasi pengendalian operasi serta menyelenggarakan sistem informasi dan komunikasi penanggulangan bencana.
49. **Pasca bencana** adalah situasi setelah tanggap darurat bencana.
50. **Pemulihan** adalah upaya mengembalikan kondisi masyarakat, lingkungan hidup, dan pelayanan publik yang terkena bencana melalui rehabilitasi.
51. **Pemerintahan Nagari** adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
52. **Pemerintah Nagari** adalah Wali Nagari atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Nagari.
53. **Penyandang Disabilitas** adalah orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak.
54. **Pengurangan Risiko Bencana Inklusi Disabilitas** adalah Sebuah upaya pengurangan risiko bencana (PRB) yang mengakomodasi beragam kebutuhan dan kapasitas masyarakat sasaran termasuk penyandang disabilitas. PRB inklusif disabilitas mengutamakan peningkatan kapasitas dan partisipasi bermakna dari penyandang disabilitas dalam pengembangan perencanaan dan merancang aksi PRB yang ditujukan untuk menghasilkan intervensi PRB yang relevan dan berdampak bagi semua, memastikan semua selamat serta tidak ada satupun yang tertinggal dalam situasi bencana.



55. **Pengelolaan Sumber Daya Bantuan Bencana** meliputi perencanaan, penggunaan, pemeliharaan, pemantauan, dan pengevaluasian terhadap barang, jasa, dan/atau uang bantuan nasional maupun internasional.
56. **Pra Bencana** adalah situasi dimana tidak terjadi bencana.
57. **Prosedur Operasi Standar** adalah serangkaian upaya terstruktur yang disepakati secara bersama tentang siapa berbuat apa, kapan, dimana, dan bagaimana cara penanganan bencana.
58. **Rehabilitasi** adalah perbaikan dan pemulihan semua aspek pelayanan umum atau masyarakat sampai tingkat yang memadai pada wilayah paska bencana dengan sasaran untuk normalisasi atau berjalannya secara wajar semua aspek pemerintahan dan kehidupan masyarakat pada wilayah pasca bencana.
59. **Rehabilitasi Penyandang Disabilitas** adalah proses pengembalian fungsi dan pengembangan untuk memungkinkan Penyandang Disabilitas mampu melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar dalam kehidupan masyarakat.
60. **Rekontruksi** adalah pembangunan kembali semua sarana prasarana, maupun kelembagaan pada wilayah pasca bencana, baik pada tingkat pemerintahan maupun masyarakat dengan sasaran utama tumbuh dan berkembangnya kegiatan perekonomian, sosial, dan budaya, tegaknya hukum dan ketertiban, dan bangkitnya peran serta masyarakat dalam segala aspek kehidupan bermasyarakat pada wilayah bencana.
61. **Rencana Penanggulangan Bencana Desa yang selanjutnya disingkat RPB Desa** merupakan sebuah dokumen resmi yang memuat data dan informasi tentang risiko bencana yang ada pada suatu desa dalam waktu tertentu dan rencana masyarakat, pemerintah desa serta para pemangku kepentingan terkait setempat untuk mengurangi risiko bencana tersebut melalui program-program dan kegiatan pembangunan fisik maupun non-fisik. RPB desa mengandung juga strategi, kebijakan dan langkah-langkah teknis administratif yang dibutuhkan untuk mewujudkan kesiapsiagaan terhadap bencana, kapasitas tanggap yang memadai, dan upaya-upaya mitigasi yang efektif.
62. **Rencana Aksi Komunitas** yang selanjutnya disingkat RAK merupakan rencana tindakan yang disusun komunitas sebagai bagian dari upaya pengurangan risiko bencana untuk meredam ancaman, mengurangi kerentanan dan meningkatkan kapasitas. RAK merupakan perincian dari rencana penanggulangan bencana pada tahapan pra bencana terdiri dari kegiatan pencegahan, mitigasi dan kesiapsiagaan.
63. **Rencana Kontinjensi Desa** yang selanjutnya disingkat Renkon Desa merupakan dokumen perencanaan tingkat desa yang didasarkan pada keadaan darurat yang diperkirakan akan segera terjadi atau dapat terjadi. Rencana kontinjensi mungkin tidak diaktifkan jika keadaan yang diperkirakan tidak terjadi. Rencana ini disusun untuk kesiapsiagaan guna mengurangi korban dan kerugian apabila keadaan darurat yang dimaksudkan terjadi.
64. **Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa**, selanjutnya disingkat **RPJM Desa**, adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.

65. **Rencana Kerja Pemerintah Desa**, selanjutnya disebut **RKP Desa**, adalah penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
66. **Risiko Bencana** adalah potensi kerugian yang ditimbulkan akibat bencana pada suatu wilayah dalam kurun waktu tertentu yang dapat berupa kematian, luka, sakit jiwa, hilangnya rasa aman, mengungsi kerusakan atau kehilangan harta, dan gangguan kegiatan masyarakat.
67. **Sarana dan Prasarana penanggulangan bencana** adalah alat yang dipakai untuk mempermudah pekerjaan, pencapaian maksud dan tujuan, serta upaya yang digunakan untuk mencegah, mengatasi, dan menanggulangi bencana.
68. **Sistem Penanganan Darurat Bencana** adalah serangkaian jaringan kerja berdasarkan prosedur-prosedur yang saling berkaitan untuk melakukan kegiatan yang dilakukan dengan segera pada saat kejadian bencana untuk mengurangi dampak buruk yang ditimbulkan, yang meliputi kegiatan penyelamatan dan evakuasi korban, harta benda, pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan pengurusan pengungsi, penyelamatan, serta pemulihan prasarana dan sarana.
69. **Status potensi bencana** adalah suatu keadaan yang ditetapkan oleh pemerintah untuk menilai potensi bencana yang akan terjadi pada jangka waktu tertentu atas dasar rekomendasi badan yang diberi tugas untuk menanggulangi bencana.
70. **Status Keadaan Darurat Bencana** adalah suatu keadaan yang ditetapkan oleh pemerintah untuk jangka waktu tertentu atas dasar rekomendasi badan yang diberi tugas untuk menanggulangi bencana.
71. **Tanggap Darurat Bencana** adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan dengan segera pada saat kejadian bencana untuk menangani dampak buruk yang ditimbulkan yang meliputi kegiatan penyelamatan, evakuasi korban dan harta benda, pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan, pengurusan pengungsi, penyelamatan, serta pemulihan prasarana dan sarana.
72. **Tim Penanggulangan Bencana/Kelompok Siaga Bencana** yang selanjutnya disingkat Tim PB atau KSB adalah kelompok relawan masyarakat baik yang berada di tingkat Nagari dan tingkat kampung yang melaksanakan kegiatan penanggulangan bencana pada tahap pra bencana, tanggap darurat dan pasca bencana
73. **Tim Penyuluhan** atau **Master Trainer** merupakan salah satu tim, bidang, regu, ataupun kelompok yang terdapat dalam kepengurusan Tim Penanggulangan Bencana (Tim PB).
74. **Wilayah bencana** adalah wilayah tertentu yang terkena dampak bencana.

## BAB II

# GAMBARAN UMUM KEBENCANAAN

### A. SEJARAH TERBENTUKNYA NAGARI AMPIANG PARAK

Dengan lahirnya Perda Provinsi Sumatera Barat Nomor 09 tahun 2000 tentang pokok-pokok pemerintahan Nagari serta ditindaklanjuti dengan Perda Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 17 tahun 2001 tentang pokok-pokok pemerintahan Nagari (yang di perbaharui melalu Perda Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 08 tahun 2007), maka berubahlah bentuk pemerintahan terendah di Provinsi Sumatera Barat dari pemerintah Desa menjadi Pemerintahan Nagari.

Nagari Ampiang Parak salah satu adalah salah satu kenagarian dalam Bandar Sepuluh yang berada di dalam daerah Kecamatan Batang Kapas, Kabupaten Pesisir Selatan. Nagari ini diapit oleh Nagari Surantih di sebelah Utara dan Nagari Kambang di sebelah Selatan.

Nagari Amping Parak dalam pemerintahan menurut adat di bagi dalam 2 bagian yaitu

1. Daerah “ Berdakung Mudik “

Yang disebut juga dengan Koto Nan Tigo, terdiri dari :

- a. Koto Ranah
- b. Koto Tinggi
- c. Sungai Kumbang

2. Daerah “Badakuang Hilir “

Daerah ini dibagi dua:

- a. Limbur Pasang Mudik

Limbur Pasang Mudik meliputi daerah Padang Bajakan, Taratak Paneh, Sikabu, Sungai Jukuik Tanjung Gadang dan Bukik Kaciak.

- b. Limbur Pasang Hilir

Limbur pasang Hilir adalah daerah yang meliputi dari Koto Tarok, Sampai ke hilir, Padang Laweh, Pasar Ampiang Parak, Alai, Padang Tae dan Ujung Air.

Yang disebut daerah Limbur Pasang adalah daerah yang terletak pada saat pasang naik (Pasang Anak Bulan), sehingga air Batang Amping Parak mengalir melalui daerah tersebut atau daerah yang mendapat limbuhan / takan dari air laut yang masuk ke muara batang air Ampiang Parak.

### B. GAMBARAN UMUM NAGARI

Nagari Ampiang Parak, Kecamatan Sutera, Kabupaten Pesisir Selatan, Propinsi Sumatera Barat merupakan 1 dari 12 Nagari di Kecamatan Sutera yang mempunyai jarak 48,7 Km dari ibu kota kabupaten. Kecamatan Sutera sendiri merupakan salah satu dari 15 kecamatan di kabupaten Pesisir Selatan yang termasuk kategori nagari maju. Batas batas wilayah Nagari Ampiang Parak adalah:

1. Sebelah Utara berbatasan dengan Nagari Surantih
2. Sebelah Timur berbatasan dengan Nagari Amping Parak Timur

3. Sebelah Barat berbatasan dengan Samudra Hindia
4. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Lengayang

Nagari Ampiang Parak terdiri dari 6 Kampung, dengan komposisi perangkatnya terdiri dari 1 orang Wali Nagari, satu orang Sekretaris Nagari (Seknag), dua orang kasi, dua orang kaur dan 6 orang Kepala Kampung. Kampung-kampung di Nagari Ampiang Parak yaitu:

1. Kampung Alai
2. Kampung Pasar Ampiang Parak
3. Kampung Padang Tae
4. Kampung Padang Lawe
5. Kampung Koto Tarok
6. Kampung Ujung Air



**Gambar 1. Peta Administratif Nagari Ampiang Parak**

Dari segi kependudukan, Nagari Ampiang Parak mempunyai jumlah penduduk + 9.242 jiwa terdiri dari 4.844 orang laki-laki, 4.398 orang perempuan, dan dengan jumlah Rumah Tangga Miskin (RTM) berjumlah 487 RTM. Adapun rincian jumlah penduduk per kampung dapat dilihat pada tabel berikut.

**Tabel 1. Jumlah Penduduk Nagari Ampiang Parak**

NO	KAMPUNG	JENIS KELAMIN		TOTAL	JUMLAH KK	JUMLAH RUMAH
		LAKI-LAKI	PEREMPUAN			
1	ALAI	474	720	1194	374	306
2	PS AMPIANG PARAK	1097	1023	2120	484	414
3	PADANG TAE	1021	816	1837	379	321
4	PADANG LAWE	668	596	1264	385	326
5	KOTO TAROK	863	576	1439	326	298
6	UJUNG AIR	721	667	1388	324	254
<b>JUMLAH</b>		<b>4844</b>	<b>4398</b>	<b>9.242</b>	<b>2272</b>	<b>1919</b>

*Sumber: Data hasil Identifikasi dan inventarisasi Forum PRB Nagari Ampiang Parak tahun 2018*

Nagari Ampiang Parak letak topografis tanahnya berbukit, dengan lahan sebagian besar dimanfaatkan oleh masyarakat untuk lahan pertanian, sehingga sebagian besar masyarakat nagari adalah petani. Selain itu, sumber mata pencaharian masyarakat Nagari Ampiang Parak adalah nelayan. Mata pencaharian tersebut merupakan mata pencaharian turun temurun sejak dahulunya.

Dari komposisi masyarakat Nagari Ampiang Parak diatas juga terdapat kelompok rentan atau kelompok masyarakat yang berisiko tinggi terdampak bencana, yakni ibu hamil, balita, lansia,

dan penyandang disabilitas. Kebutuhan dan kapasitas kelompok berisiko tinggi tersebut sering terabaikan saat situasi bencana sehingga membutuhkan perhatian khusus dalam pengurangan risiko bencana, utamanya terkait penyesuaian terhadap kemampuan dan kebutuhan masyarakat yang berbeda-beda. Data kelompok berisiko tinggi yang ada di Nagari Ampiang Parak dapat dilihat pada tabel berikut.

**Tabel 2. Jumlah Penduduk Berisiko Tinggi Nagari Ampiang Parak**

NO	KAMPUNG	JUMLAH PENDUDUK BERISIKO TINGGI							TOTAL
		LANSIA		BUMIL	BALITA		DISABILITAS		
		L	P		L	P	L	P	
1	ALAI	80	116	14	60	45	2	3	320
2	PS AMPIANG PARAK	90	106	60	40	60	5	3	364
3	PADANG TAE	46	58	11	23	27	3	6	174
4	PADANG LAWE	98	128	13	80	64	5	5	393
5	KOTO TAROK	98	101	14	58	72	6	5	354
6	UJUNG AIR	27	49	8	56	41	3	7	191
<b>JUMLAH</b>		<b>439</b>	<b>558</b>	<b>120</b>	<b>317</b>	<b>309</b>	<b>24</b>	<b>29</b>	<b>1796</b>

*Sumber: Data hasil Identifikasi dan inventarisasi Forum PRB Nagari Ampiang Parak Tahun 2018*

Dari tabel diatas dapat disimpulkan bahwa terdapat 1796 kelompok berisiko tinggi yang penting untuk dilibatkan dan diberikan pendampingan secara khusus dalam upaya pengurangan risiko bencana di Nagari Ampiang Parak. Dari 1796 jumlah penduduk berisiko tinggi tersebut diantaranya adalah 53 jiwa penyandang disabilitas yang memiliki berbagai macam hambatan (penglihatan, pendengaran, mobilitas, mental, dsb). Namun demikian, selain hambatan, dalam proses identifikasi masyarakat juga didapati bahwa penyandang disabilitas yang memiliki potensi untuk berkontribusi aktif dalam upaya pengurangan risiko bencana melalui kegiatan pemberdayaan.

Kemampuan penyandang disabilitas dalam melakukan penyelamatan dan evakuasi mandiri saat situasi bencana dibagi dalam 3 kategori sebagai berikut.

1. Mampu melakukan upaya penyelamatan dan evakuasi secara mandiri.
2. Mampu melakukan upaya penyelamatan diri tetapi mengalami hambatan dalam melakukan evakuasi secara mandiri ke titik kumpul.
3. Tidak mampu melakukan upaya penyelamatan dan evakuasi secara mandiri.

Penyebaran keberadaan penyandang disabilitas serta kategori kemampuan evakuasi mandiri di setiap kampung pada Nagari Ampiang Parak dapat dilihat pada tabel berikut.

**Tabel 3. Persebaran Penyandang Disabilitas Berdasarkan Kategori**

NO	KAMPUNG	KATEGORI KEMAMPUAN EVAKUASI			JUMLAH DISABILITAS
		1	2	3	
1	ALAI	1	2	2	5
2	PS AMPIANG PARAK	4	2	2	8
3	PADANG TAE	5	2	2	9
4	PADANG LAWE	4	-	6	10
5	KOTO TAROK	3	4	4	11
6	UJUNG AIR	1	4	5	10
<b>TOTAL</b>		<b>18</b>	<b>14</b>	<b>21</b>	<b>53</b>

Sumber: Data hasil Identifikasi dan inventarisasi Forum PRB Nagari Ampiang Parak Tahun 2018.

Berdasarkan tabel di atas dapat disimpulkan bahwa dari total **53** orang penyandang disabilitas yang tergolong ke dalam kategori 1 berjumlah **18** orang, kategori 2 berjumlah **14** orang, dan kategori 3 juga berjumlah **21** orang.

Selain dari kondisi geografis dan situasi kependudukannya yang kaya serta beragam, Nagari Ampiang Parak juga berpotensi terhadap beberapa ancaman bencana. Hal ini terlihat dari sejarah kejadian bencana yang telah diidentifikasi. Berdasarkan sejarah kejadian bencana, Nagari Ampiang Parak pernah terjadi dan berpotensi terhadap bencana, seperti bencana gempa bumi, tsunami, banjir, tanah longsor, epidemi dan wabah penyakit, cuaca ekstrim, kekeringan, serta gelombang ekstrim dan abrasi.

### C. GAMBARAN SEJARAH KEBENCANAAN NAGARI AMPIANG PARAK

Identifikasi sejarah kebencanaan Nagari Ampiang Parak dilakukan secara partisipatif menggunakan metode *Participatory Rural Appraisal* dengan batas waktu identifikasi sejarah kejadian adalah 10 tahun. Dengan demikian, proses pengidentifikasian sejarah bencana di Nagari Ampiang Parak dimulai dengan sejarah kejadian bencana sejak tahun 2008 hingga 2018. Pengidentifikasian jenis bencana tidak hanya dilakukan kepada jenis bencana yang pernah terjadi di Nagari Ampiang Parak saja, namun juga terhadap jenis-jenis bencana yang berpotensi terjadi di Nagari Ampiang Parak. Hasil identifikasi tersebut dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 4. Identifikasi Sejarah Kebencanaan di Nagari Ampiang Parak

NO	JENIS BENCANA	PERNAH	POTENSI
1	GEMPABUMI	√	
2	TSUNAMI ==		√
3	BANJIR	√	
4	TANAH LONGSOR	√	
5	EPIDEMI WABAH PENYAKIT	√	
6	KEKERINGAN		√
7	GELOMBANG EKSTRIM DAN ABRASI	√	
8	CUACA EKSTRIM	√	
9	KEBAKARAN HUTAN DAN LAHAN	√	
10	KEBAKARAN GEDUNG DAN PEMUKIMAN		√
11	KONFLIK SOSIAL	√	

Sumber: Data hasil Identifikasi dan inventarisasi Forum PRB Nagari Ampiang Parak tahun 2018.

Dari tabel di atas dan berdasarkan informasi dari Forum PRB Nagari Ampiang Parak selaku Tim Penyusun Dokumen RPB Nagari Ampiang Parak, penjabaran tentang sejarah kejadian bencana di Nagari Ampiang Parak adalah:

#### 1. Gempabumi

Kejadian gempabumi selalu terjadi setiap tahun. Hasil identifikasi sejarah kejadian bencana Nagari Ampiang Parak dari tahun 2008 sampai tahun 2018, maka kejadian bencana gempa bumi dengan dampak terbesar terjadi sebanyak 2 kali kejadian. Kejadian ini terjadi pada tahun:

- ✓ Tahun 2009, pasca gempa Kabupaten Padang Pariaman.
- ✓ Tahun 2010, pasca gempa Sikakap, Kabupaten Kepulauan Mentawai.

Meski dua kejadian gempa tersebut sangat berdampak, tetapi pada kenyataannya gempa selalu terjadi setiap tahun namun tidak dalam intensitas guncangan yang tinggi.

## 2. Tsunami

Kejadian tsunami memang belum pernah terjadi di Nagari Ampiang Parak, tetapi letak geografis nagari yang terletak di pesisir pantai yang berbatasan langsung dengan Samudera Hindia membuat Nagari Ampiang Parak sangat berpotensi terhadap bencana tsunami.

## 3. Banjir

Banjir pernah terjadi di tahun 2011, 2013 dan 2016 di beberapa kampung seperti Padang Tae, Alai dan Koto Tarok. Kejadian tersebut sering dipicu oleh cuaca yang tidak menentu dan curah hujan yang tinggi.

## 4. Tanah Longsor

Tanah longsor pernah terjadi di Nagari Ampiang Parak tahun 2015 dan 2016, tepatnya di kampung Koto Tarok karena lokasi kampung yang memiliki perbukitan yang cukup luas.

## 5. Epidemii dan Wabah Penyakit

Epidemi dan Wabah Penyakit hampir terjadi dalam setiap tahun di seluruh kampung di Nagari Ampiang Parak. Bencana ini dapat berupa penyakit malaria, cikungunya, DBD, dan penyakit lainnya. Kejadian tersebut pernah menimbulkan korban jiwa pada masyarakat Nagari Ampiang Parak.

Dengan adanya kejadian dan potensi Epidemii Dan Wabah Penyakit, pemerintahan Nagari Ampiang Parak dan Kabupaten Pesisir Selatan telah menetapkan beberapa bidan, perawat, dan kader posyandu untuk ditempatkan dipustu yang ada di beberapa kampung.

Berdasarkan gambaran tersebut dapat disimpulkan bahwa bencana ini juga sangat perlu untuk tetap diwaspadai oleh masyarakat dan Pemerintahan Nagari Ampiang Parak.

## 6. Kekeringan

Kejadian kekeringan belum pernah terjadi di Nagari Ampiang Parak, tetapi kejadian ini berpotensi pada saat kondisi cuaca kemarau berkepanjangan.

## 7. Gelombang Ekstrim dan Abrasi

Berlokasi di sepanjang pesisir pantai membuat bencana Gelombang Ekstrim dan Abrasi sering terjadi di pinggiran pantai dari mulai kampung Alai, Pasar Ampiang Parak, Padang Tae dan Ujung Air. Kejadian ini lebih berdampak kepada pengikisan pinggiran pantai yang semakin mendekat kepada pemukiman masyarakat.

## 8. Cuaca Ekstrim

Kejadian bencana cuaca ekstrim sering terjadi dalam setiap tahun di beberapa kampung di Nagari Ampiang Parak. Cuaca ekstrim terjadi di kampung Alai, Pasar Ampiang Parak, Padang Tae, Koto Tarok dan Ujung Air.

9. Kebakaran Hutan dan Lahan

Kejadian kebakaran hutan dan lahan pernah terjadi pada tahun 2011. Hal ini disebabkan karena semakin tingginya aktifitas masyarakat di ladang ditambah dengan perilaku membakar sampah di ladang tersebut.

10. Kebakaran Gedung & Pemukiman

Seiring semakin padatnya penduduk di Nagari Ampiang Parak maka potensi kebakaran gedung dan pemukiman bisa saja terjadi di wilayah ini.

11. Konflik Sosial

Konflik Sosial pernah terjadi di tahun 2016 disebabkan karena terjadinya benturan dari dua pihak yang memiliki perbedaan kepentingan.

Dari 11 bencana yang ada di Nagari Ampiang Parak, baik yang telah terjadi dan berpotensi, 5 jenis bencana diidentifikasi yang paling memberikan dampak kepada masyarakat baik secara kehidupan dan penghidupan yaitu gempa bumi, tsunami, gelombang ekstrim dan abrasi, epidemi dan wabah penyakit, dan cuaca ekstrim.

## D. GAMBARAN SUMBER DAYA NAGARI AMPIANG PARAK

Secara umum, sumber daya Nagari Ampiang Parak termasuk sumber daya manusianya dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 5. Gambaran Umum Sumber Daya Nagari Ampiang Parak

LIST SUMBER DAYA NAGARI AMPIANG PARAK			
NO	JENIS SUMBER DAYA	JUMLAH	
1	Betadine	3	unit
2	Pevanol	3	unit
3	Alkohol	1	unit
4	Selang oksigen	4	unit
5	Obat-obatan	13	kotak
6	Tandu	28	unit
7	Senter Kepala	40	unit
8	Bantal	130	unit
9	Selimut	175	unit
10	Tikar	28	unit
11	Tabung oksigen	2	unit
12	Handscoon	2	unit
13	Masker	10	unit
14	Mantel/jas hujan	14	unit

LIST SUMBER DAYA NAGARI AMPIANG PARAK			
NO	JENIS SUMBER DAYA	JUMLAH	
15	Mitela	20	unit
16	Bidai	20	unit
17	Matras	2	unit
18	Gunting	20	unit
19	Air mineral	42	unit
20	Perban	8	unit
21	Kassa steril	100	unit
22	Kassa gulung	100	unit
23	Kapas	100	unit
24	Kain elastis	60	unit
25	Radio HT	49	unit
26	Senter	42	unit
27	Gergaji	7	unit
28	Tenda pleton	14	unit
29	Toa	7	unit
30	Helm	56	unit
31	Sepatu bot	42	unit
32	Sarung tangan	70	unit
33	Kacamata pelindung	112	unit
34	Rompi	56	unit
35	Cangkul	14	unit
36	Terpal	14	unit
37	Kursi roda	6	unit
38	Termos nasi	14	unit
39	P3K	42	kotak
40	Radio HT	42	unit
41	Tali	14	gulung
42	Kuali	14	unit
43	Ember	42	unit
44	Baskom	28	unit
45	Gayung	42	unit
46	Piring	700	unit
47	Gelas	700	unit
48	Cerek/Teko	28	unit
49	Pisau, parang	7	unit
50	Radio FM	28	unit
51	Sendok	700	unit
52	Lampu LED	42	unit

LIST SUMBER DAYA NAGARI AMPIANG PARAK			
NO	JENIS SUMBER DAYA	JUMLAH	
53	RIG	7	unit
54	KURSI RODA	6	Unit

Sumber: Data hasil Identifikasi dan inventarisasi Forum PRB Nagari Ampiang Parak, Tahun 2018

Dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana di Nagari Ampiang Parak memerlukan keterlibatan semua lembaga selaku sumber daya manusia yang ada di nagari. Sumber daya manusia yang ada di Nagari Ampiang Parak dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 6. Sumber Daya Manusia Nagari Ampiang Parak**

LIST SUMBER DAYA NAGARI AMPIANG PARAK			
NO	JENIS SUMBER DAYA	JUMLAH	
1	Forum PRB	41	Orang
2	Tim Penyuluhan (Master Trainer)	12	Orang
3	Tim PB Nagari	40	Orang
4	Tim PB Kampung	219	Orang
5	Tenaga Pemerintahan Nagari	20	Orang
6	LPMN	15	Orang
7	PKK	35	Orang
8	Hansip/Linmas	60	Orang
9	Tokoh Agama	80	Orang
10	Tokoh Pemuda (Karang Pemuda)	20	Orang
11	Relawan Sibit	6	Orang
12	Laskar Turtle Camp	25	Orang
13	PKK	35	Orang
14	Tenaga Pendidikan	210	Orang

Sumber: Data hasil Identifikasi dan inventarisasi Forum PRB Nagari Ampiang Parak Tahun 2018

Dengan adanya kelembagaan dan sumber daya manusia di Nagari Ampiang Parak sebagaimana terlihat pada tabel di atas diharapkan upaya pengurangan risiko bencana yang dilakukan di Nagari Ampiang Parak dapat dilaksanakan secara terpadu, terstruktur, terarah dan terukur secara inklusif. Selain itu, juga diharapkan Pemerintah Nagari Ampiang Parak dengan seluruh pemangku kepentingan di Nagari dapat bersama-sama menginisiasi upaya pengurangan risiko bencana yang bekerjasama dengan kelembagaan Tim PB/KSB dan Forum PRB yang telah di terbentuk.

## E. PENILAIAN RISIKO

Risiko bencana adalah potensi kerugian yang ditimbulkan akibat bencana pada suatu kawasan dalam kurun waktu tertentu yang dapat berupa kematian, luka, sakit, jiwa terancam, hilangnya rasa aman, mengungsi, kerusakan atau kehilangan harta, dan gangguan kegiatan

masyarakat. Penentuan tingkat risiko bencana ditentukan melalui penggabungan antara tingkat ancaman, tingkat kerentanan, dan tingkat kapasitas.

Penggabungan dapat dilakukan secara dua tahap. Pada tahap pertama, merupakan penggabungan tingkat kerentanan dan tingkat kapasitas. Penggabungan ini menghasilkan Tingkat Keterpaparan. Setelah dihasilkan tingkat keterpaparan, maka selanjutnya digabungkan dengan tingkat ancaman. Hasil penggabungan antara tingkat keterpaparan dan tingkat ancaman akan menghasilkan Tingkat Risiko untuk setiap jenis bencana yang ada di Nagari Ampiang Parak.

Tingkat Keterpaparan dan Tingkat Risiko Nagari Ampiang Parak dapat dilihat pada gambar dibawah ini

**Gambar 2. Matriks Tingkat Keterpaparan Nagari Ampiang Parak**

TINGKAT EXPOSURE		TINGKAT KERENTANAN		
		RENDAH	SEDANG	TINGGI
TINGKAT KAPASITAS	RENDAH			
	SEDANG	Longsor, Kebakaran Hutan, Konflik Sosial, 'Banjir, Abrasi, Cuaca Ekstrim, Wabah Penyakit		
	TINGGI			Gempa Bumi dan Tsunami

Setelah dihasilkan tingkat keterpaparan, maka selanjutnya digabungkan dengan tingkat ancaman. Hasil penggabungan antara tingkat keterpaparan dan tingkat ancaman akan menghasilkan tingkat risiko untuk setiap jenis bencana yang ada di Nagari Ampiang Parak. Tingkat Risiko Nagari Ampiang Parak dapat dilihat pada gambar matriks dibawah ini:

Gambar 3. Matriks Tingkat Risiko Bencana Nagari Ampiang Parak

TINGKAT RISIKO		TINGKAT ANCAMAN/BAHAYA		
		RENDAH	SEDANG	TINGGI
TINGKAT EXPOSURE	RENDAH	Danjir, Longsor, Kebakaran Hutan, Konflik Sosial	Abrasi, Cuaca Ekstrem, Wabah Penyakit	
	SEDANG			
	TINGGI			Gempa Bumi dan Tsunami

Berdasarkan penilaian risiko di atas dapat disimpulkan bahwa ancaman bencana gempa bumi dan tsunami termasuk pada bencana yang memiliki tingkat risiko tinggi. Mempertimbangkan risiko dan dampak yang mungkin ditimbulkan oleh bencana-bencana tersebut, maka disepakati bahwa penyusunan Rencana Kontinjensi disepakati akan difokuskan pada **ancaman bencana gempa bumi berpotensi tsunami di tingkat Nagari Ampiang Parak.**

### III

## PENGEMBANGAN SKENARIO

### A. PENENTUAN KEJADIAN

Tingginya intensitas ancaman gempa bumi berpotensi tsunami yang terjadi di wilayah Kabupaten Pesisir Selatan khususnya Nagari Ampiang Parak, Kecamatan Sutura, dan tingkat risiko yang begitu besar apabila bencana tersebut terjadi, maka Nagari Ampiang Parak menetapkan bencana gempabumi berpotensi tsunami sebagai prioritas untuk disusun Rencana Kontinjensinya.

Berdasarkan kondisi geografis wilayah Nagari Ampiang Parak, berpotensi terjadi bencana gempabumi dan tsunami yang sangat besar. Potensi ini dipengaruhi oleh wilayah Nagari Ampiang Parak yang berhadapan langsung dengan pertemuan Lempeng Indo-Australia dan Lempeng Eurasia di sepanjang lepas Pantai Barat Pulau Sumatera yang dapat menimbulkan gempa tektonik di dasar laut, dengan intensitas relatif tinggi yang sangat berpotensi membangkitkan gelombang tsunami.

Berdasarkan penelitian yang dilaksanakan oleh Earth Observatory of Singapore (EOS) Nanyang Technological University Singapura dan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), perkiraan lokasi sumber gempa yang berpotensi terjadi di wilayah Sumatera Barat di masa yang akan datang dapat dilihat pada gambar 3.

Berdasarkan penjabaran di atas, penentuan skenario kejadian bencana gempabumi berpotensi tsunami untuk Rencana Kontinjensi Nagari Ampiang Parak mengacu pada skenario Rencana Kontinjensi Bencana Tsunami Sumatera Barat Tahun 2011. Kronologis skenario kejadian tersebut dapat dilihat pada tabel berikut.



**Tabel 7. Kronologis Penentuan Kejadian Bencana Gempabumi Berpotensi Tsunami**

No	Item	Keterangan
1	Waktu kejadian Gempa	Tengah malam pukul 02.00 WIB
2	Kekuatan Gempa	8.8 SR
3	Kedalaman	10 km dari permukaan laut
4	Jarak	50 km barat daya Kota Padang
5	Gelombang tsunami 1	Mencapai Barat kepulauan mentawai dalam waktu 5-7 menit, ketinggian 15 meter dari permukaan laut.
6	Gelombang tsunami lanjutan	Mencapai pesisir barat daratan Sumatera Barat pada menit ke 20 , ketinggian 5-11 meter dari permukaan laut
7	Landaan tsunami	0-2 km dataran rendah
8	Durasi waktu	3-4 jam setelah gempa
9	Dampak kejadian	Rusak nya sarana dan prasarana dan banyaknya jumlah korban di kepulauan Mentawai dan pesisir barat daratan Sumatera Barat

Berdasarkan skenario kejadian dari para ahli seperti tabel di atas, didapatkan ikhtisar situasi kejadian tsunami Nagari Ampiang Parak sebagai berikut :

1. Gempa dan tsunami berdampak pada 2900 KK dengan total jumlah kurang lebih 8.936 jiwa terdiri dari 4.000 jiwa laki-laki dan 4.936 jiwa perempuan di seluruh wilayah Nagari Ampiang Parak. Rincan korban terlihat dalam tabel berikut:

	Dewasa		Lansia		Disabilitas		Ibu hamil	Balita dan anak-anak	
	L	P	L	P	L	P		L	P
<b>Korban Jiwa</b>	800	1050	80	170	5	7	30	300	400
<b>Korban hilang</b>	100	111	20	30	2	3		100	120
<b>Pengungsi</b>	1640	2150	50	50	3	5	30	700	780

2. Jalur transportasi antar kampung terputus dengan robohnya beberapa jembatan antara lain:
  - a. Jembatan besi Ampiang Parak (Ampiang Parak-Padang Tae)
  - b. Jembatan Ayek munin (Ujung Air- Padang Tae)
  - c. Jembatan Padang Tae (Masjid Padang Tae)
  - d. Jembatan Pasar Ampiang Parak (Jalan Belantai)
  - e. Jembatan Labuah Kabau (Padang Lawe)
3. Hampir seluruh akses jalan rusak berat sehingga tidak bisa dilewati oleh kendaraan dan juga mempersulit warga untuk menuju tempat evakuasi.
4. Kondisi listrik mati total di semua kampung di Nagari Ampiang Parak.
5. Sumber air bersih tidak tersedia di kampung Ujung Air dan Pasar Ampiang Parak, sedangkan untuk kampung Alai, Padang Laweh, Padang Tae, Koto Tarok masih tersedia sumber air bersih dari mata air perbukitan atau rumah penduduk yang tidak terdampak oleh tsunami.
6. Jaringan telepon/handphone terputus karena hilangnya sinyal, sebagian jaringan RIG dan beberapa unit radio HT rusak sehingga hanya bisa menggunakan radio FM-AM sebagai alat penerima informasi. Untuk beberapa HT yang berlokasi di daerah zona aman masih bisa difungsikan.
7. Gempa dan tsunami merusak sarana dan prasarana di Nagari Ampiang Parak berupa 6 unit masjid, 17 unit musholla, 10 unit TK/Paud, 7 unit SD, 2 unit SMP, 1 unit SMA, 1 unit Pustu, 1 unit Puskesmas, 1 unit Kantor Wali Nagari, 1 unit Kantor KAN, 1 unit pasar Nagari, 1 unit bank sampah, 2 unit lapangan futsal, 2 unit lapangan bola kaki, 21 unit toko, 13 unit mini market, 1 unit SPBU, kawasan konservasi penyu, vegetasi pantai, dan play ground, lahan pertanian , perkebunan dan peternakan.
8. Terdapat 1.752 unit rumah yang rusak berat, 501 unit rumah yang hilang dan 76 unit rumah yang rusak ringan.
9. Gempa dan tsunami juga berdampak pada 51 unit kapal tonda, 23 perahu payang, 15 pukat pinggir dan 7 perahu dayung yang hilang.
10. Bencana susulan yang diperkirakan akan terjadi setelah gempa dan tsunami yaitu longsor di Kampung Alai (Bukit Mandamai), Koto Tarok (Bukit Panjang), abrasi pantai di Kampung Alai,



Padang Tae dan Ujung di sepanjang bibir pantai. Selain itu juga terjadi wabah penyakit kulit, diare, demam berdarah dan ispa.

Berdasarkan kemungkinan dampak ini akan ditetapkan sasaran dan strategi dalam penanganan darurat bencana gempa bumi berpotensi tsunami. Untuk menjaga penanganan bencana tsunami yang bermartabat, inklusif dan efektif maka perlu ditetapkan standar kualitas pelayanan minimum bersama operasi tanggap darurat bencana tsunami yang dibahas pada bab selanjutnya.

## **B. SKENARIO DAMPAK BENCANA**

Pengembangan skenario dilihat dari dampak yang ditimbulkan oleh bencana tsunami. Dampak tersebut dikembangkan berdasarkan skenario yang sudah ditetapkan sebelumnya, dimana tsunami dipicu oleh gempa bumi berkekuatan 8,8 SR. Berdasarkan hal tersebut, juga akan berdampak pada beberapa aspek. Aspek yang menjadi dasar pengembangan skenario kejadian adalah aspek kehidupan, aspek sarana prasarana, aspek ekonomi, dan aspek lingkungan. Aspek-aspek ini akan mengukur perkiraan jumlah jiwa yang terdampak, rupiah yang hilang dan hektar lahan yang rusak untuk masing-masing kampung yang terdampak. Berdasarkan hasil kesepakatan maka didapatkan skenario dampak bencana tsunami terhadap aspek-aspek yang berpotensi sebagai berikut.

### **1. Aspek Kehidupan**

Dari aspek kehidupan, diperkirakan penduduk yang berada di wilayah zona landaan GEMPA DAN TSUNAMI yang terancam jiwanya meliputi 1388 jiwa dengan perkiraan bahwa bencana tsunami mengakibatkan dampak yang merusak yaitu pada daerah yang berjarak 0 – 2 km dari pinggir laut dengan ketinggian 5 – 11 meter dari permukaan laut serta daerah aliran sungai. Sementara daerah-daerah yang berjarak >2 km hanya berdampak sedang dan rendah.

Berdasarkan hal tersebut, pengembangan skenario dampak yang diasumsikan untuk aspek kehidupan yang terdampak langsung dari kejadian gempa bumi berpotensi tsunami dapat dilihat pada Tabel berikut.

Tabel 8. Dampak Bencana Gempabumi Berpotensi Tsunami Nagari Ampiang Parak

No	Kampung	Jumlah Jiwa Terdampak		Jumlah Kelompok Berisiko Tinggi Terdampak										Meninggal	Hilang	Luka-luka	Mengungsi				
		L	P	Hambatan Komunikasi		Hambatan Pendengaran		Hambatan Konsentrasi		Hambatan Mobilitas		Hambatan Penglihatan									
				L	P	L	P	L	P	L	P	L	P								
1	Alai	474	720	1	2	0	0	4	0	3	3	10	8	605	220	60	309				
2	Pasar Ampiang Parak	1097	1023	1	1	0	0	2	1	2	2	0	0	700	300	500	520				
3	Padang Lawe	668	596	2	1	0	1	1	1	1	0	2	1	96	2	178	988				
4	Padang Tae	1021	816	8	2	0	1	1	1	3	1	0	1	497	125	373	842				
5	Koto Tarok	863	576	0	3	6	1	4	0	2	5	2	0	150	82	300	907				
6	Ujung Air	721	667	1	1	0	1	3	4	15	40	0	1	1200	115	50	23				
Total		<b>1388</b>																			

Asumsi ini telah memperkirakan topografi wilayah, kapasitas masyarakat dan tempat evakuasi yang ada di daerah tersebut. Untuk mengurangi korban jiwa terancam bertambah maka yang perlu diantisipasi adalah upaya sistem peringatan dini yang baik dan lancarnya akses evakuasi masyarakat ke titik evakuasi dapat dicapai sebelum gelombang tsunami datang.

## 2. Aspek Sarana dan Prasarana

Dari aspek ini dampak yang diperkirakan berpengaruh terhadap keberfungsian Sarana Prasana dan fasilitas/aset. Beberapa sarana prasarana dan fasilitas/aset yang diperkirakan akan mengalami kerusakan atau terhambat keberfungsian antara lain dapat dilihat pada Tabel.

**Tabel 9. Fasilitas/Aset yang Rusak atau Tidak Berfungsi Akibat Tsunami di Nagari Ampiang Parak**

No	Kampung	Jenis	Jumlah	Satuan	Terancam/ Satuan		Dampak		
					Aksesibel	Non-aksesibel	Rusak Ringan		Rusak Berat
							Aksesibel	Non-aksesibel	
1	Alai	SDN 22 Alai	1	unit	0	1			v
		TK Permata Hati	1	unit	0	1			v
		Masjid	1	unit	1	0			v
		Musholla	2	unit	0	2			v
		Puskesri	1	unit	0	1			v
		Giat irigasi/sumur bor	2	unit	1	1			v
		PDAM	205	unit					v
		Jaringan listrik	370	unit		370			v
		Jalan	3.8	km	3.8				v
		Rumah penduduk	350	unit	100	250			v
2	Pasar Ampiang Parak	Jembatan	2	unit					v
		Jalan	5.2	km	5.2				v
		Jaringan listrik	530	unit		530			v
		PDAM	612	unit					v
		Rumah penduduk	494	unit					v
		Kantor Wali Nagari	1	unit		1			v
		Kantor KAN	1	unit		1			v
		BUMNAG	1	unit		1		v	
		Pustu	1	unit		1			v
		Musholla	4	unit		4			v
		Masjid	1	unit		1		v	
		Sekolah Dasar	1	unit		1			v
		Madrasah Ibtidaiyah	1	unit		1			v
		Sekolah Menengah Pertama	1	unit		1		v	
		MTSN	1	unit		1			v
		TK/PAUD	3	unit		3			v
		Sumur tanah	494	unit					v
Sumur bor	6	unit					v		
Shelter	1	unit	1			v			
3	Padang Lawe	Puskesri	1	unit	0	1			v

No	Kampung	Jenis	Jumlah	Satuan	Terancam/ Satuan		Dampak		
					Aksesibel	Non-aksesibel	Rusak Ringan		Rusak Berat
							Aksesibel	Non-aksesibel	
		SDN 16 Padang Lawe	1	unit	1	0	v		
		MIS	1	unit	0	1			v
		PAUD	1	unit	0	1			v
		Masjid/Musholla	4	unit	4	0			v
		Pos pemuda	1	unit	0	1			v
		Rumah penduduk	74	unit					v
		Jembatan	1	unit	0	1			v
		Jalan	2	km	2		v		
		PDAM	30	unit			v		
		Jaringan listrik	2	km		2			v
4	Padang Tae	Puskesri	1	unit	1	0			v
		Musholla/Masjid	7	unit	5	2			v
		SDN 26	1	unit	0	1			v
		SMA 2 Sutera	1	unit	1	0	v		
		TK/PAUD	2	unit	1	1	v		
		Pos pemuda	1	unit	0	1			v
		SPBU	1	unit	0	1			v
		Jembatan	7	unit	0	7			v
		Jembatan Gantung	1	unit	0	1			v
		Kolam renang	1	unit	0	1			v
		Jalan	4	km	2	2	v		
		Jaringan listrik	3	km	0	3			v
		PDAM	3	km					v
		Gardu listrik	1	unit	0	1			v
Rumah penduduk	175	unit					v		
Posko Nelayan	1	unit	0	1			v		
5	Koto Tarok	SDN 25	1	unit	1	0			v
		TK/PAUD Jabal Nur	1	unit	0	1		v	
		Puskesri	1	unit	1	0	v		
		Rumah penduduk	383	unit					v
		Masjid	5	unit	0	1			v
		Jalan	6	km	6	0	v		

No	Kampung	Jenis	Jumlah	Satuan	Terancam/ Satuan		Dampak		
					Aksesibel	Non-aksesibel	Rusak Ringan		Rusak Berat
							Aksesibel	Non-aksesibel	
6	Ujung Air	Jaringan listrik	6	km	0	6			v
		PDAM	300	unit					v
		SDN 09	1	unit	0	1			v
		TK/PAUD	1	unit	0	1			v
		Puskesri	1	unit	0	1			v
		Masjid	1	unit	0	1			v
		Musholla	1	unit	0	1			v
		Rumah penduduk	250	unit					v
		Jalan	1.5	km	1.5				v
		Jembatan besar	1	unit	1	0			v
		Jembatan kecil	5	unit	0	5			v
		Polongan	3	unit	0	3			v
		Posko ASB	1	unit	1	0	v		

### 3. Aspek Ekonomi

Dampak bencana tsunami juga diperkirakan akan berpengaruh terhadap perekonomian masyarakat seperti yang terlihat pada Tabel berikut.

**Tabel 10. Aspek Ekonomi yang Rusak atau Tidak Berfungsi Akibat Tsunami di Nagari Ampiang Parak**

No	Kampung	Jenis	Jumlah	Satuan	Dampak			
					Rusak Ringan	Rusak Sedang	Rusak Berat	Tidak Rusak
1	Alai	Warung nasi	3	unit	0	0	3	0
		Warung kopi	15	unit	0	0	15	0
		Pengelolaan tempurung	1	unit	0	0	1	0
		Pertokoan	12	unit	0	0	12	0
		Depot air minum	2	unit	0	0	2	0
		Pangkas rambut	1	unit	0	0	1	0

No	Kampung	Jenis	Jumlah	Satuan	Dampak			
					Rusak Ringan	Rusak Sedang	Rusak Berat	Tidak Rusak
		Usaha perabot	2	unit	0	0	2	0
		Pengolahan ikan teri	3	unit	0	0	3	0
		Perahu nelayan	22	unit	0	0	22	0
		Pukat pinggir	10	unit	0	0	10	0
		Peternakan sapi	275	kandang	0	0	275	0
		Peternakan ayam	200	kandang	0	0	200	0
		Peternakan kambing	3	kandang	0	0	3	0
		Peternakan kerbau	2	kandang	0	0	2	0
		Sarang walet	3	kandang	0	0	3	0
		Bengkel	3	kandang	0	0	3	0
2	Pasar Ampiang Parak	Pasar Nagari	1	unit	0	0	1	0
		Koperasi	1	unit	0	0	1	0
		Bumnag	1	unit	0	0	1	0
		Pertokoan	15	unit	0	1	14	0
		Café	7	unit	0	0	7	0
		Peternakan	24	kandang	0	0	24	0
		Pabrik es	1	unit	0	0	1	0
		Pengolahan ikan teri	2	unit	0	0	2	0
		Pukat	5	unit	0	0	5	0
		Perahu nelayan	6	unit	0	0	6	0
		Sarang walet	2	unit	0	0	2	0
		Usaha perabot	3	unit	0	0	3	0
		Bengkel	5	unit	0	0	5	0
		Kel SPP	15	unit	0	0	15	0
		3	Padang Lawe	Depot air	1	unit	0	0
Usaha batako	5			unit	0	0	5	0
Bengkel las	2			unit	0	2	0	0
Peternakan	500			kandang	0	0	500	0
Gilingan padi	3			unit	0	3	0	0
Toko	10			unit	0	10	0	0
Usaha perabot	1			unit	0	0	1	0
4	Padang Tae	Penginapan	2	unit	0	0	2	0
		Ruko	7	unit	2	0	5	0

No	Kampung	Jenis	Jumlah	Satuan	Dampak			
					Rusak Ringan	Rusak Sedang	Rusak Berat	Tidak Rusak
		Apotik	1	unit	0	0	1	0
		Counter hp	2	unit	0	0	2	0
		Klinik gigi	1	unit	0	0	1	0
		Kios pupuk	1	unit	0	0	1	0
		Bengkel	5	unit	1	0	4	0
		Usaha perabot	2	unit	0	0	2	0
		SPBU	1	unit	0	0	1	0
		Kapal ikan	3	unit	0	0	3	0
		Pondok teri	6	unit	0	0	6	0
		Pangkas rambut	3	unit	0	0	3	0
		Perahu penangkap ikan	15	unit	0	0	15	0
		Pukat	13	unit	0	0	13	0
		Peternakan sapi	155	kandang	0	55	0	100
		Peternakan ayam petelur	1	unit	0	1	0	0
		Peternakan puyuh	1	unit	0	1	0	0
		Peternakan kerbau	5	kandang	0	0	5	0
		Peternakan kambing	4	kandang	0	4	0	0
		Sarang walet	6	unit	0	1	5	0
		Rumah makan	5	unit	0	0	5	0
		Café	2	unit	0	0	2	0
5	Koto Tarok	Pertokoan	2	unit	0	1	1	0
		Kedai	18	unit	8	5	3	2
		Usaha perabot	1	unit	1	0	0	0
		Bengkel	3	unit	2	0	1	0
		Depot air	1	unit	0	0	1	0
		Peternakan sapi	383	kandang	20	10	3	350
6	Ujung Air	Pertokoan	63	unit	0	0	63	0
		Industri kecil/rumah tangga	16	unit	0	0	16	0
		Peternakan sapi	186	kandang	0	0	186	0
		Peternakan ayam	260	kandang	0	0	260	0
		Peternakan itik	16	kandang	0	0	16	0
		Peternakan puyuh	2	kandang	0	0	2	0
		Kolam ikan	6	unit	0	0	6	0

No	Kampung	Jenis	Jumlah	Satuan	Dampak			
					Rusak Ringan	Rusak Sedang	Rusak Berat	Tidak Rusak
						Perahu nelayan	63	unit
	Usaha perabot	1	unit	0	0	1	0	

#### 4. Aspek Lingkungan

Dampak bencana tsunami juga diperkirakan akan berpengaruh terhadap lingkungan berupa kerusakan cukup parah pada lingkungan pesisir pantai, hasil pertanian, perkebunan seperti yang terlihat pada tabel berikut.

**Tabel 11. Aspek Lingkungan yang Rusak Akibat Tsunami di Nagari Ampiang Parak**

No	Kampung	Jenis	Jumlah	Satuan	Dampak		
					Rusak Ringan	Rusak Sedang	Rusak Berat
1	Alai	Sawah	45	Ha	0	0	45
		Ladang	35	Ha	0	0	35
		Cemara laut	250	batang	0	0	250
		Tempat Pemakaman Umum	500	meter	0	0	500
		Kawasan pantai	1.2	km	0	0	1.2
		Nipah	1	Ha	0	0	1
2	Pasar Ampiang Parak	Sawah	20	Ha	0	0	20
		Kebun sawit	50	Ha	30	10	10
		Vegetasi pantai	26	Ha	0	0	26
		Konservasi penyu	26	Ha	0	0	26
		Kelompok Desa Wisma	6	unit	0	0	6
3	Padang Lawe	Sawah	5	Ha	0	5	0
		Perkebunan sawit	12	Ha	0	12	0
4	Padang Tae	Sawah	11	Ha	0	11	0
		Perkebunan sawit	63	Ha	0	63	0
		Cemara laut	1.5	Km	0	0	1.5
		Kawasan pantai	1.5	Km	0	0	1.5

No	Kampung	Jenis	Jumlah	Satuan	Dampak		
					Rusak Ringan	Rusak Sedang	Rusak Berat
		Kebun kelapa	9	Ha	0	9	0
		Lapangan futsal	1	unit	0	0	1
		Lapangan bola kaki	1	unit	0	1	0
<b>5</b>	Koto Tarok	Sawah	75	Ha	25	0	50
		Kebun sawit	60	Ha	0	0	60
		Kebun karet	3	Ha	0	0	3
<b>6</b>	Ujung Air	Hutan bakau	10	Ha	0	0	10
		Kawasan pantai	1.5	Km	0	0	1.5
		Perkebunan sawit	350	Ha	0	40	310

### C. STANDART PELAYANAN OPERASI DARURAT

Dengan skenario dampak seperti yang telah diuraikan sebelumnya, maka didapatkan standar pelayanan operasi tanggap darurat. Hal ini ditetapkan untuk menjaga penanganan bencana tsunami bermartabat dan efektif. Dari hasil kesepakatan maka standar kualitas pelayanan minimum operasi darurat dapat lihat lebih jelas pada tabel berikut.

**Tabel 12. Standar Kualitas Pelayanan Minimum Operasi Darurat Bencana**

NO	JENIS OPERASI	INDIKATOR KEBERHASILAN	
		KUALITAS UMUM	WAKTU
<b>1</b>	KAJIAN CEPAT	Mampu memberikan data aktual (sesuaikan dengan data skenario ancaman) terkait kejadian bencana yang dibandingkan dengan skenario bencana yang disusun	1x24 jam
<b>2</b>	EVAKUASI	Seluruh masyarakat di daerah terpapar gempa dan tsunami telah berada di lokasi pengungsian SEMENTARA yang telah ditentukan Seluruh masyarakat di daerah terpapar gempa dan tsunami telah berada di lokasi pengungsian AKHIR sementara (TES) yang telah ditentukan	1x20 menit 1x20 menit
<b>3</b>	SAR	75 % dari laporan korban hilang telah ditemukan; ada korban yang dapat diselamatkan	7x24 jam
<b>4</b>	PEMENUHAN KEBUTUHAN DASAR	Kebutuhan Dasar telah terdistribusi di titik pengungsian terjauh	4x24 jam

NO	JENIS OPERASI	INDIKATOR KEBERHASILAN	
		KUALITAS UMUM	WAKTU
5	PERLINDUNGAN KELOMPOK RENTAN		Pelayanan kesehatan untuk kelompok rentan di lokasi pengungsian telah terselenggara 1X24 jam
6	PEMULIHAN FASILITAS KRITIS		Tersedianya Fasilitas Pelayanan Dasar alternatif (Transportasi, Energi, Air Bersih) 2x24 jam Memfungsikan kembali fasilitas kritis yang terkena bencana 7x24 jam
7	MANAJEMEN KOORDINASI	DAN	Terbentuknya KODAL Tanggap Darurat, KODAL Lapangan dan Aktivasi Satgas dan Tim Operasi Tanggap Darurat Bencana ( aktivasi tim PB Kampung) 1x6 jam
8	TRANSPORTASI, INFOKOM PENDIDIKAN	DAN	Tersedianya jalur komunikasi darurat bencana hingga ke titik pengungsian 1X24 jam



No	Operasi	Pelaku																						
		Wali Nagari	Bamus	KAN	Kepala Kampung	Tim PB Nagari	Tim PB Kampung	Forum PRB	Tim PB Penyandang Disabilitas Karang Taruna	Kader Yandu	Laskar Turtle Camp	Bidan Nagari	LPMN	MUI	BPBD	PMI/Sibat	Tagana	Babinkhatibma	Babinsa	Damkar	Kelompok Tani	Kelompok Nelayan	PKK	Majelis Ta'lim Sanggar Seni
1	Kaji Cepat	PN	PN	PN	PL	K	PL	PN	PL	PL	PL	-	PL	-	-	PL	PL	-	-	-	-	-	-	-
2	Evakuasi	PN	PN	PN	PL	K	PL	PN	PL	PL	PL	PL	PL	PN	-	PL	PL	PL	PL	PL	-	-	-	-
3	SAR	PN	PN	PN	PL	K	PL	PN	PL	PL	-	PL	PL	-	-	PL	PL	PL	PL	PL	PL	PL	-	-
4	Pemenuhan Kebutuhan Dasar	PN	PN	PN	PL	K	PL	PN	PL	PL	-	PL	PL	-	-	PL	PL	PL	PL	PL	PL	PL	-	-
5	Perlindungan Kelompok Rentan	PN	PN	PN	PL	K	PL	PN	PL	PL	-	-	PL	-	PN	PL	PL	-	PL	PL	-	-	-	-
6	Pemulihan Fasilitas Kritis	PN	PN	PN	PL	K	PL	PN	PL	PL	-	-	PL	-	-	PL	PL	-	PL	PL	-	-	-	-
7	Manajemen dan Koordinasi	PN	PN	PN	PL	K	PL	PN	PL	PL	-	PL	PL	-	PN	PL	PL	-	PL	PL	-	PL	PL	P L L
8	Transportasi, Infokom dan Pendidikan	PN	PN	PN	PL	K	PL	PN	PL	PL	-	PL	PL	-	PN	PL	PL	-	PL	PL	-	PL	PL	P L L
PL	Pelaksana																							
K	Koordinator																							
PN	Pengelola																							

## IV

# PERENCANAAN OPERASI

Dalam upaya penanganan darurat bencana, seluruh aspek terdampak perlu dipulihkan fungsinya dengan segera, sehingga pemulihan fungsi tersebut diharapkan mampu mengembalikan atau meningkatkan kehidupan normal masyarakat yang terdampak bencana serta menjadi parameter untuk pengakhiran status darurat bencana. Berdasarkan pertimbangan tersebut, perlu disusun kebijakan dan strategi untuk mendorong lahirnya kegiatan-kegiatan yang mempercepat proses pemulihan darurat bencana.

Dengan dasar ikhtisar situasi dan skenario dampak kejadian tsunami Nagari Ampiang Parak, memiliki kebijakan sasaran dan strategi serta struktur komando penanganan darurat dalam upaya penanganan bencana tsunami sebagai berikut.

### **A. SASARAN DAN STRATEGI OPERASI PENANGANAN DARURAT**

Dalam upaya penanganan darurat bencana terdapat 3 sasaran prioritas yang mendasar dilakukan. Dari setiap sasaran tersebut diturunkan menjadi sebuah strategi yang didasarkan pada ikhtisar situasi dan skenario dampak. Penjelasan terkait sasaran dan strategi adalah sebagai berikut.

#### **1. Sasaran Umum 1 : Keselamatan Nyawa**

Strategi pada sasaran ini adalah bagaimana langkah-langkah yang akan diambil untuk menjamin keselamatan nyawa, korban luka, selamat, pengungsi, dan petugas pelaksana penanganan darurat . Adapun strategi ataupun sasaran khusus Nagari Ampiang Parak untuk mendukung sasaran 1 adalah sebagai berikut.

**Tabel 15. Sasaran Umum Keselamatan Jiwa**

<b>SASARAN KHUSUS</b>	<b>STRATEGI</b>
<b>A. PENYELAMATAN KORBAN</b>	1. Mengaktifkan sistem informasi tanda bahaya berupa kentongan dan sirine setelah gempa bumi terjadi
	2. Memandu masyarakat dalam melaksanakan proses evakuasi ke tempat relokasi setelah sistem informasi tanda bahaya diaktifkan.
	3. Membantu proses evakuasi masyarakat yang membutuhkan perlakuan khusus termasuk lansia, ibu hamil, balita, anak-anak dan penyandang disabilitas dalam melakukan proses evakuasi.
	4. Melaksanakan pendataan cepat
	5. Melaksanakan evakuasi, penyelamatan dan pencarian korban bencana.
	6. Mengirimkan tenaga kesehatan dan perlengkapan untuk pertolongan pertama pada korban bencana

SASARAN KHUSUS	STRATEGI
	tsunami.
<b>B. KESELAMATAN PETUGAS</b>	1. Memakai alat pelindung diri
	2. Memastikan petugas dalam kondisi sehat
	3. Membawa surat tugas dan tanda pengenal
	4. Memahami kondisi lapangan
<b>C. MANAJEMEN POS KOORDINASI LAPANGAN</b>	1. Ketersediaan logistik dan dapur umum
	2. Ketersediaan data korban
	3. Ketersediaan obat-obatan dan alat kesehatan

## 2. Sasaran Umum 2 : Stabilitas Keadaan Darurat

Strategi pada sasaran ini adalah bagaimana langkah-langkah yang akan diambil untuk mencegah paparan bencana tidak meluas, korban tidak bertambah dan mengantisipasi kemungkinan bencana turunan. Adapun strategi ataupun sasaran khusus Nagari Ampiang Parak untuk mendukung sasaran 2 tersebut adalah sebagai berikut.

**Tabel 16. Sasaran Umum Stabilitas Keadaan Darurat**

SASARAN KHUSUS	STRATEGI
<b>D. ANTISIPASI BENCANA TURUNAN (Konflik Sosial dan Wabah Penyakit)</b>	1. Pemulihan psikologis masyarakat terdampak bencana.
	2. Menyiapkan sarana hiburan untuk pemulihan trauma.
	3. Memberdayakan masyarakat setempat bersama relawan untuk bisa segera melokalisir daerah terkena dampak.
	4. Menyelenggarakan jenazah korban bencana.
	5. Ketahanan pangan di lokasi zona aman
	6. Menjalin kerjasama dengan pihak kesehatan, kepolisian, TNI dan Satpol PP
	7. Menyediakan MCK dan Sumber air bersih (sumur dll) di Tempat Evakuasi Akhir (TEA)
<b>E. ANTISIPASI JUMLAH KORBAN TIDAK BERTAMBAH</b>	1. Tidak kembali ke lokasi terdampak bencana selama kondisi belum aman
	2. Mendirikan posko logistik dan dapur umum
	3. Pemulihan psikologis dan memberikan pelayanan kesehatan kepada kelompok rentan
	4. Memastikan lokasi aman, nyaman dan strategis

### 3. Sasaran Umum 3 : Pemeliharaan/Pengamanan Properti/Aset

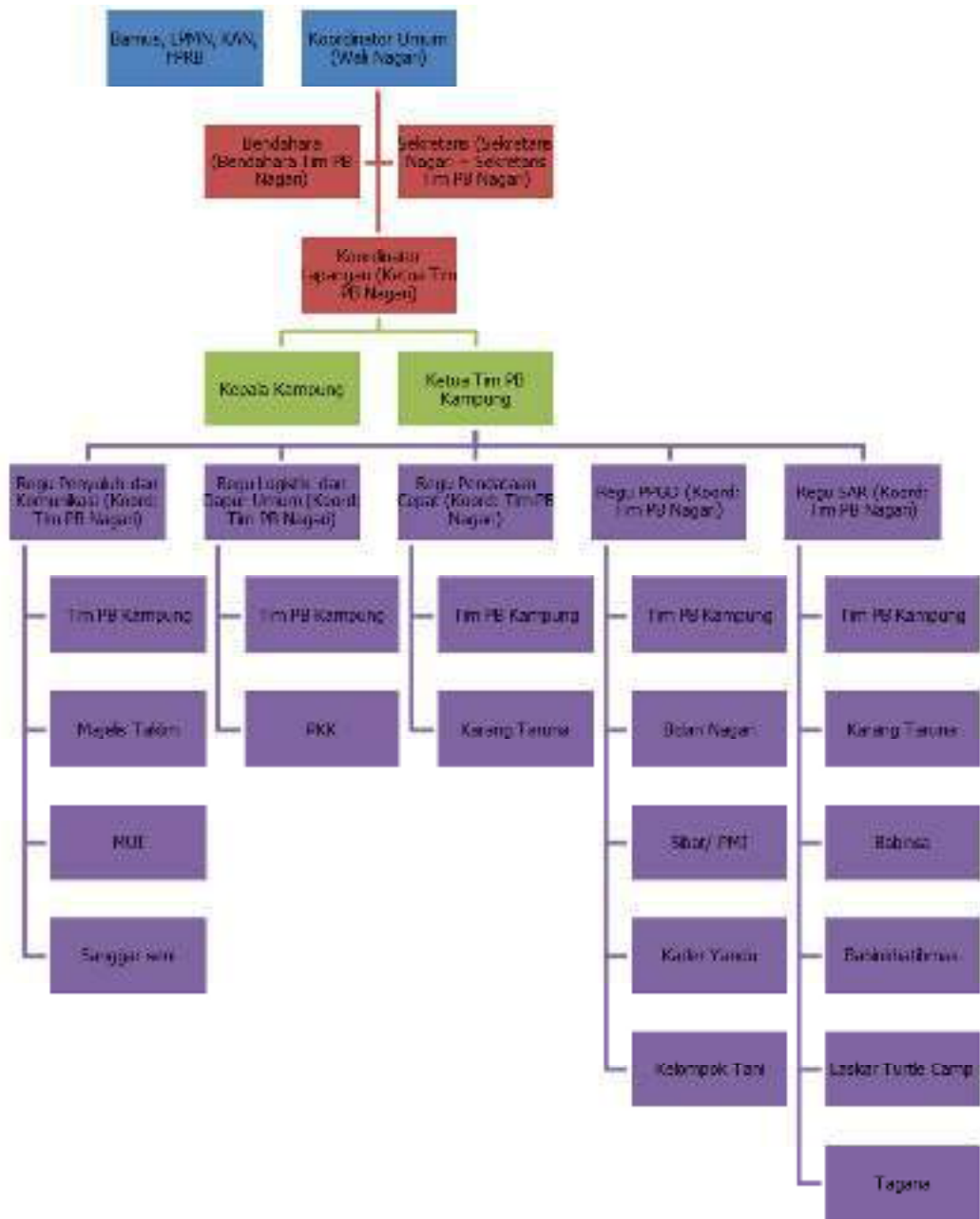
Strategi pada sasaran ini adalah bagaimana langkah-langkah ini merupakan tanggungjawab kabupaten untuk mendukung Nagari dalam pemeliharaan/pengamanan dan/atau pemulihan fungsi dari fasilitas publik, fasilitas kritis yang terdampak serta pemeliharaan dan/atau penjagaan properti masyarakat terdampak. Adapun strategi ataupun sasaran khusus dalam mendukung sasaran 3 tersebut adalah sebagai berikut.

**Tabel 17. Sasaran Umum Pemeliharaan/Pengamanan Properti/Aset**

SASARAN KHUSUS	STRATEGI
<b>F. PEMULIHAN FASILITAS KRITIS</b>	1. Memberikan dukungan sumber listrik alternatif di lokasi-lokasi pengungsian.
	2. Pemulihan fungsi jembatan yang putus dengan mempertimbangkan berbagai metode yang mungkin diterapkan.
	3. Pemulihan fungsi fasilitas pelayanan kesehatan di daerah terdampak.
<b>G. PEMULIHAN JALUR KOMUNIKASI</b>	1. Menyediakan jalur komunikasi dengan radio komunikasi
	2. Berkoordinasi dengan pihak telkom
<b>H. PENGAMANAN ASET MASYARAKAT</b>	1. Mengamankan aset berharga masyarakat
	2. Pengamanan rumah warga yang rusak
	3. Mengamankan berkas-berkas penting masyarakat

### **B. STRUKTUR KOORDINASI PENANGANAN DARURAT**

Perencanaan kelompok disusun berdasarkan Struktur Koordinasi Penanganan Darurat Bencana yang akan dipakai saat penanganan bencana. Struktur koordinasi ini disusun berdasarkan landaan, ikhtisar situasi dan kebijakan strategi pada Nagari Ampiang Parak. Berdasarkan kesepakatan, penanganan darurat bencana tsunami di Nagari Ampiang Parak merupakan operasi pertama yang akan dilakukan sebelum bantuan dari Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan datang. Adapun Struktur Koordinasi Penanganan Darurat Bencana Nagari Ampiang Parak yang disusun dapat dilihat pada gambar berikut.



**Gambar 5. Struktur Koordinasi Penanganan Darurat Bencana Nagari Ampiang Parak**

Dari gambar di atas dapat dijelaskan bahwa Nagari Ampiang Parak dalam upaya penanganan tsunami lebih bersifat teknis, dalam mendukung Komando Tanggap Darurat Kabupaten Pesisir Selatan. Sebelum tim respon awal dan dukungan sumber daya dari kecamatan dan kabupaten datang dalam pelaksanaan operasi darurat, maka Nagari Ampiang Parak dapat mengelola dan mengerahkan segala sumber daya yang dimiliki untuk dapat bergerak sesuai dengan kelompok–kelompok pada struktur komando tanggap darurat Nagari Ampiang Parak.

Dari struktur tersebut, sebelum dukungan Kabupaten Pesisir Selatan datang ke lokasi terdampak Koordinator Umum dapat dipegang oleh Bapak Wali Nagari dan Koordinator Lapangan di laksanakan oleh Kepala Kampung. Pada saat kendali dipegang oleh Nagari, langkah – langkah awal penyelamatan nyawa masyarakat terdampak bencana tsunami sudah dapat diaktivasi/digerakkan sesuai dengan prosedur dan sasaran strategi yang dirancang sebelumnya. Setelah bantuan dukungan datang maka Struktur Komando Tanggap Darurat Nagari Ampiang Parak akan melebur kepada Struktur Komando Tanggal Darurat Kabupaten Pesisir Selatan. Untuk detail siapa berbuat apa, kapan, dimana dan bagaimana pada masing–

masing bidang operasi berdasarkan struktur di atas di jabarkan di dalam Prosedur Tetap Penanganan Darurat Bencana Nagari Ampiang Parak.

### **C. FASILITAS OPERASI PENANGANAN DARURAT**

Untuk memudahkan proses penanganan darurat maka perlu dibentuk fasilitas operasi tanggap darurat pada tingkat Nagari. Beberapa fasilitas operasi yang diperlukan untuk pelaksanaan operasi tanggap darurat adalah:

#### 1. Staging Area (Pangkalan Aju).

Prinsip dasar dalam penentuan dan pendirian Pangkalan Aju adalah sebagai berikut:

- ✓ Boleh terdapat lebih dari satu Pangkalan Aju pada sebuah operasi tanggap darurat.
- ✓ Merupakan lokasi sementara pada keadaan darurat dimana personel dan peralatan disimpan dalam status TERSEDIA saat menunggu penugasan taktis (peralatan rusak atau pun personel yang tidak dalam shift kerja TIDAK BOLEH berada pada Pangkalan Aju).
- ✓ Pangkalan Aju harus berlokasi cukup dekat ke lokasi keadaan darurat sehingga dapat mempercepat waktu respon namun masih cukup jauh pada zona yang berdampak langsung.
- ✓ Pangkalan Aju dapat berdampingan pada dengan Posko, kemah, pangkalan helikopter, dan sebagainya.

Berdasarkan hal di atas, untuk Nagari Ampiang Parak disepakati lokasi yang akan di pakai nantinya untuk menjadi Pangkalan Aju adalah di Kampung Padang Tae dan Koto Tarok yang berpotensi bencana tsunami di Nagari Ampiang Parak.

#### 2. Camp (Perkemahan)

Prinsip dasar dalam penentuan dan pendirian Perkemahan adalah sebagai berikut:

- ✓ Satu operasi tanggap darurat dapat memiliki beberapa perkemahan, namun tidak semua operasi membutuhkan perkemahan (tergantung skala dan periode operasi).
- ✓ Merupakan lokasi dimana sumberdaya dapat disimpan guna mendukung operasi darurat bencana apabila Pangkalan tidak dapat diakses oleh semua sumberdaya.
- ✓ Merupakan lokasi sementara yang ada di dalam area umum operasi darurat yang dilengkapi dan memiliki staff untuk menyediakan makanan, minuman, area tidur dan layanan kebersihan.

Berdasarkan hal di atas untuk Nagari Ampiang Parak disepakati lokasi yang akan di pakai nantinya untuk menjadi Perkemahan adalah disetiap Tempat Evakuasi Akhir (TEA) setiap dusun yang berpotensi bencana tsunami di Nagari Ampiang Parak (digabung dengan Pangkalan Aju).

#### 3. Helispot (Tempat Pendaratan Heli)

Prinsip dasar dalam penentuan dan pendirian Helispot adalah sebagai berikut:

- ✓ Satu operasi tanggap darurat hanya memiliki satu Pangkalan Helikopter dengan beberapa titik pendaratan (HeliSpot).
- ✓ Pangkalan Heli adalah lokasi dimana operasi udara yang dilakukan dengan menggunakan helikopter.
- ✓ Helispot merupakan lokasi yang lebih bersifat sementara dan terdapat di lokasi keadaan darurat berlangsung.
- ✓ Lokasi yang dipilih untuk Helispot adalah lokasi yang memungkinkan helikopter dapat mendarat dan tinggal landas dengan aman.

Berdasarkan hal di atas untuk Nagari Ampiang Parak disepakati lokasi yang akan di pakai nantinya untuk menjadi Helispot adalah di Kampung Padang Tae, Koto Tarok, Padang Lawe.

#### 4. Helispot (Tempat Pendaratan Heli)

Prinsip dasar dalam penentuan dan pendirian Helispot adalah sebagai berikut:

- ✓ Satu penanganan darurat hanya memiliki satu Pangkalan Helikopter dengan beberapa titik pendaratan (HeliSpot).
- ✓ Pangkalan Heli adalah lokasi dimana operasi udara yang dilakukan dengan menggunakan helikopter.
- ✓ Helispot merupakan lokasi yang lebih bersifat sementara dan terdapat di lokasi keadaan darurat berlangsung.
- ✓ Lokasi yang dipilih untuk Helispot adalah lokasi yang memungkinkan helikopter dapat mendarat dan tinggal landas dengan aman.

Berdasarkan hal di atas untuk Nagari Ampiang Parak disepakati lokasi yang akan di pakai nantinya untuk menjadi Helispot adalah di Kampung Padang Tae, Koto Tarok, Padang Lawe.

### **D. REKAPITULASI KEBUTUHAN REGU, KESENJANGAN DAN MOBILISASI SUMBER DAYA**

Dari Struktur Tanggap Darurat Nagari Ampiang Parak dapat dilihat bahwa terdapat regu-regu dalam penanganan operasi darurat tsunami. Kelompok–kelompok tersebut didapatkan berdasarkan analisa dari ikhtisar situasi. Kelompok–kelompok tersebut adalah sebagai berikut:

#### **1. Regu Penyuluh dan Komunikasi**

Apabila terjadi bencana tsunami yang dipicu oleh gempa bumi berkekuatan 8,8 SR dengan ketinggian gelombang 5 – 11 meter dan landaan tsunami 0 – 2 km. Dapat mengakibatkan sejumlah 1388 masyarakat evakuasi ke lokasi aman. Untuk meminimalisir jatuhnya korban perlu segera dilakukan suatu tindakan berupa pengaktifasian peringatan dini, penyebaran informasi dan komunikasi kepada masyarakat.

Untuk mendukung pelaksanaan kegiatan tersebut disusun strategi kelompok. Strategi, kebutuhan sumber daya dan pelaku yang terlibat dalam regu penyuluh dan komunikasi dilihat pada tabel berikut.

**Tabel 18. Sumberdaya Kebutuhan, Kesenjangan dan Mobilisasi regu Penyuluh dan Komunikasi**

<b>Nama Sumberdaya yang Dibutuhkan</b>	<b>Spesifikasi</b>	<b>Dibutuhkan</b>	<b>Dimiliki</b>	<b>Kesenjangan</b>	<b>Metode Pemenuhan Kesenjangan</b>	<b>Lokasi Tujuan Saat Mobilisasi</b>	<b>Waktu Kedatangan yang Dibutuhkan</b>
Toa	SNI	14	7	7	Pengadaan	Pos Nagari	1x24 jam
In-focus	SNI	6	0	6	Pengadaan	Pos Nagari	1x24 jam
Komputer/Laptop	SNI	6	0	6	Pengadaan	Pos Nagari	1x24 jam
Kamera	Canon D1000	6	0	6	Pengadaan	Pos Nagari	1x24 jam
Ruang penyuluhan		6	0	6	Pengadaan	Pos Nagari	1x24 jam
Printer		6	0	6	Pengadaan	Pos Nagari	1x24 jam
Radio HT		62	44	12	Pengadaan	Pos Nagari	1x24 jam
RIG		8	7	1	Pengadaan	Pos Nagari	1x24 jam
Tikar	Plastik	28	14	14	Pengadaan	Pos Nagari	1x24 jam
Kursi		7	0	7	Swadaya	Pos Nagari	1x24 jam
Meja		7	0	7	Swadaya	Pos Nagari	1x24 jam
Kertas plano		100	0	100	Swadaya	Pos Nagari	1x24 jam
Spidol	Hitam, Biru, Merah	12	0	12	Swadaya	Pos Nagari	1x24 jam
Kertas HVS		50	0	50	Swadaya	Pos Nagari	1x24 jam
Buku		50	0	50	Swadaya	Pos Nagari	1x24 jam
Pulpen		50	0	50	Swadaya	Pos Nagari	1x24 jam
Pensil		50	0	50	Swadaya	Pos Nagari	1x24 jam
Jepitan kertas		12	0	12	Bantuan/Hibah	Pos Nagari	1x24 jam
Gunting		20	0	20	Bantuan/Hibah	Pos Nagari	1x24 jam
Selotip	Kertas	20	0	20	Bantuan/Hibah	Pos Nagari	1x24 jam
Pisau		6	0	6	Bantuan/Hibah	Pos Nagari	1x24 jam
Speaker		6	0	6	Bantuan/Hibah	Pos Nagari	1x24 jam

## 2. Regu SAR

Untuk meminimalisir jatuhnya korban lebih besar perlu segera dilakukan suatu tindakan berupa pengerahan personil dan peralatan serta pendukung lainnya secara optimal untuk melakukan pencarian dan pertolongan korban selamat. Secara bersamaan, perlu juga dilakukan penyelenggaraan korban meninggal yang dibantu oleh masyarakat dan tokoh agama setempat agar jenazah korban dapat diselenggarakan secara layak sesuai dengan keyakinan dan norma berlaku.

Untuk mendukung pelaksanaan upaya SAR disusun strategi kelompok. Strategi, kebutuhan sumber daya dan pelaku yang terlibat dalam regu SAR dapat dilihat pada Tabel berikut.

**Tabel 19. Sumberdaya Kebutuhan, Kesenjangan dan Mobilisasi Regu SAR**

<b>Nama Sumberdaya yang Dibutuhkan</b>	<b>Spesifikasi</b>	<b>Dibutuhkan</b>	<b>Dimiliki</b>	<b>Kesenjangan</b>	<b>Metode Pemenuhan Kesenjangan</b>	<b>Lokasi Tujuan Saat Mobilisasi</b>	<b>Waktu Kedatangan yang Dibutuhkan</b>
Perahu karet	SNI	14	0	14	Bantuan/Hibah	Pos Nagari	1x24 jam
Kantong mayat	SNI	3500	0	3500	Bantuan/Hibah	Pos Nagari	1x24 jam
Radio HT	Kenwood	500	49	451	Bantuan/Hibah	Pos Nagari	1x12 jam
Tandu	SNI	60	21	39	Bantuan/Hibah	Pos Nagari	1x5 jam
Ambulance		12	0	12	Bantuan/Hibah	Pos Nagari	1x24 jam
Senter	5 watt	1000	42	958	Bantuan/Hibah	Pos Nagari	1x24 jam
Gergaji	SNI	100	7	93	Bantuan/Hibah	Pos Nagari	1x24 jam
Parang		120	0	120	Bantuan/Hibah	Pos Nagari	1x3 jam
Mesin sinso	Ukuran kecil	12	0	12	Bantuan/Hibah	Pos Nagari	1x3 jam
Tenda pleton	Ukuran 6x10 m	24	14	10	Bantuan/Hibah	Pos Nagari	1x5 jam
Toa		30	7	23	Bantuan/Hibah	Pos Nagari	1x24 jam
Jas hujan		1500	14	1486	Bantuan/Hibah	Pos Nagari	1x3 jam
Pisau		1000	0	1000	Bantuan/Hibah	Pos Nagari	1x5 jam
Helm	SNI	300	56	244	Bantuan/Hibah	Pos Nagari	1x24 jam
Masker		300	0	300	Bantuan/Hibah	Pos Nagari	1x24 jam
Sepatu bot		500	56	444	Bantuan/Hibah	Pos Nagari	1x24 jam
Sarung tangan	SNI	500	70	430	Bantuan/Hibah	Pos Nagari	1x24 jam
Kacamata pelindung	SNI	500	112	488	Bantuan/Hibah	Pos Nagari	1x24 jam
Rompi	SNI	500	56	444	Bantuan/Hibah	Pos Nagari	1x24 jam
Rompi pelampung	SNI	200	0	200	Bantuan/Hibah	Pos Nagari	1x24 jam
Tali		100	0	100	Bantuan/Hibah	Pos Nagari	1x24 jam
Cangkul	SNI	100	14	86	Bantuan/Hibah	Pos Nagari	1x5 jam
Terpal		100	14	86	Bantuan/Hibah	Pos Nagari	1x5 jam
Velbed	SNI	100	0	100	Bantuan/Hibah	Pos Nagari	1x3 jam
Watertank		30	0	30	Bantuan/Hibah	Pos Nagari	1x6 jam
Genset		20	0	20	Bantuan/Hibah	Pos Nagari	1x24 jam
Bensin		2	0	2	Bantuan/Hibah	Pos Nagari	1x24 jam
Kursi roda	SNI	12	6	6	Bantuan/Hibah	Pos Nagari	1x24 jam
Tongkat	SNI	12	0	12	Bantuan/Hibah	Pos Nagari	1x24 jam

### 3. Regu Pertolongan Pertama Gawat Darurat (PPGD)

Untuk meminimalisir jatuhnya korban lebih besar perlu segera dilakukan suatu tindakan berupa pengerahan personil dan peralatan serta pendukung lainnya secara optimal untuk melakukan pelayanan kesehatan untuk pertolongan dan pengobatan medis serta dampingan pasca trauma untuk para pengungsi di lokasi-lokasi pengungsian. Tim kesehatan yang tergabung dalam Regu PPGD harus bergerak cepat untuk mengantisipasi jatuhnya korban jiwa lebih banyak dan memberikan pertolongan kepada korban luka ringan dengan segera agar dapat membantu korban lainnya di barak penampungan. Selain itu perlu dilakukan antisipasi untuk penyakit menular seperti penyakit kulit, flu dan batuk. Korban-korban luka berat perlu segera ditangani di rumah sakit yang masih berfungsi atau rumah sakit darurat.

Untuk mendukung pelaksanaan pelayanan kesehatan disusun strategi kelompok. Strategi, kebutuhan sumber daya dan pelaku yang terlibat dalam Regu PPGD dapat dilihat pada tabel.

**Tabel 20. Sumberdaya Kebutuhan, Kesenjangan dan Mobilisasi Regu PPGD**

Nama Sumberdaya yang Dibutuhkan	Spesifikasi	Dibutuhkan	Dimiliki	Kesenjangan	Metode Pemenuhan Kesenjangan	Lokasi Tujuan Saat Mobilisasi	Waktu Kedatangan yang Dibutuhkan
Betadine		5	3	2	Bantuan/Hibah	Pos Nagari	1x24 jam
Pevanol		4	3	1	Bantuan/Hibah	Pos Nagari	1x24 jam
Alkohol		2	1	1	Bantuan/Hibah	Pos Nagari	1x24 jam
Selang oksigen	1.5 m	4	4	0	Bantuan/Hibah	Pos Nagari	1x24 jam
Obat-obatan		15	13	2	Bantuan/Hibah	Pos Nagari	1x24 jam
Tandu		28	28	0	Bantuan/Hibah	Pos Nagari	1x24 jam
Senter Kepala		50	40	10	Bantuan/Hibah	Pos Nagari	1x24 jam
Bantal		150	130	20	Bantuan/Hibah	Pos Nagari	1x24 jam
Selimut	Bahan kain	200	175	25	Bantuan/Hibah	Pos Nagari	1x24 jam
Tikar		300	240	60	Bantuan/Hibah	Pos Nagari	1x24 jam
Tenda		15	14	1	Bantuan/Hibah	Pos Nagari	1x24 jam
Tabung oksigen		2	2	0	Bantuan/Hibah	Pos Nagari	1x24 jam
Handscoon		10	2	8	Bantuan/Hibah	Pos Nagari	1x24 jam
Masker		30	10	20	Bantuan/Hibah	Pos Nagari	1x24 jam
Mantel/jas hujan	full body	10	9	1	Bantuan/Hibah	Pos Nagari	1x24 jam
Mitela		50	20	30	Bantuan/Hibah	Pos Nagari	1x24 jam
Bidai	kayu ringan	50	20	30	Bantuan/Hibah	Pos Nagari	1x24 jam
Matras	80 x 190	30	2	28	Bantuan/Hibah	Pos Nagari	1x24 jam

Nama Sumberdaya yang Dibutuhkan	Spesifikasi	Dibutuhkan	Dimiliki	Kesenjangan	Metode Pemenuhan Kesenjangan	Lokasi Tujuan Saat Mobilisasi	Waktu Kedatangan yang Dibutuhkan
Gunting	ukuran besar dan kecil	40	20	20	Bantuan/Hibah	Pos Nagari	1x24 jam
Radio HT		47	42	5	Bantuan/Hibah	Pos Nagari	1x24 jam
Air mineral		10	8	2	Bantuan/Hibah	Pos Nagari	1x24 jam
Perban		280	100	180	Bantuan/Hibah	Pos Nagari	1x24 jam
Kassa steril		150	100	50	Bantuan/Hibah	Pos Nagari	1x24 jam
Kassa gulung		150	100	50	Bantuan/Hibah	Pos Nagari	1x24 jam
Kapas		160	60	100	Bantuan/Hibah	Pos Nagari	1x24 jam
Kain elastis		70	20	50	Bantuan/Hibah	Pos Nagari	1x24 jam
Pengukur tensi		7	0	7	Bantuan/Hibah	Pos Nagari	1x24 jam
Stetoskop		7	0	7	Bantuan/Hibah	Pos Nagari	1x24 jam
Termometer		15	0	15	Bantuan/Hibah	Pos Nagari	1x24 jam

#### 4. Regu Logistik dan Dapur Umum

Untuk menjamin martabat dan hak para korban bencana, pemenuhan kebutuhan dasar pengungsi harus dapat dilaksanakan. Pelaksanaan kebutuhan ini harus disesuaikan dengan standar kemanusiaan yang berlaku umum di Indonesia.

Untuk mendukung pelaksanaan logistic dan dapur umum disusun strategi kelompok. Strategi, kebutuhan sumber daya dan pelaku yang terlibat Regu Logistik dan Dapur Umum dapat dilihat pada tabel berikut.

**Tabel 21. Sumberdaya Kebutuhan, Kesenjangan dan Mobilisasi Regu Logistik & Dapur Umum**

Nama Sumberdaya yang Dibutuhkan	Spesifikasi	Dibutuhkan	Dimiliki	Kesenjangan	Metode Pemenuhan Kesenjangan	Lokasi Tujuan Saat Mobilisasi	Waktu Kedatangan yang Dibutuhkan
Termos nasi	ukuran 20 L	28 pcs	14 pcs	14 pcs	Bantuan/Hibah	Pos Nagari	3x24 jam
Panci	Stainless	70 pcs	0	70 pcs	Bantuan/Hibah	Pos Nagari	3x24 jam
Bawang	Merah dan Putih	120 kg	0	120 kg	Bantuan/Hibah	Pos Nagari	3x24 jam
Cabe	Rawit dan Merah	180 kg	0	180 kg	Bantuan/Hibah	Pos Nagari	3x24 jam
Bumbu dapur	Royco	6 pack	0	6 pack	Swadaya	Pos Nagari	3x24 jam
Blender	Philips	14 pcs	0	14 pcs	Swadaya	Pos Nagari	3x24 jam

<b>Nama Sumberdaya yang Dibutuhkan</b>	<b>Spesifikasi</b>	<b>Dibutuhkan</b>	<b>Dimiliki</b>	<b>Kesenjangan</b>	<b>Metode Pemenuhan Kesenjangan</b>	<b>Lokasi Tujuan Saat Mobilisasi</b>	<b>Waktu Kedatangan yang Dibutuhkan</b>
Pompa air	Sanyo	14 pcs	0	14 pcs	Bantuan/Hibah	Pos Nagari	3x24 jam
Sarung tangan	Plastik	124 psg	0	124 psg	Bantuan/Hibah	Pos Nagari	3x24 jam
Mantel	Full body	70 pcs	56 pcs	14 pcs	Bantuan/Hibah	Pos Nagari	3x24 jam
Bola lampu	Philips	70 pcs	0	70 pcs	Bantuan/Hibah	Pos Nagari	3x24 jam
Kabel	SNI	700 m	0	700 m	Bantuan/Hibah	Pos Nagari	3x24 jam
Bensin		210 L	0	210 L	Bantuan/Hibah	Pos Nagari	3x24 jam
Jeriken	Cap jempol	14 pcs	0	14 pcs	Bantuan/Hibah	Pos Nagari	3x24 jam
Pakaian dewasa		600 pcs	0	600 pcs	Bantuan/Hibah	Pos Nagari	3x24 jam
Pakaian anak-anak		900 pcs	0	900 pcs	Bantuan/Hibah	Pos Nagari	3x24 jam
P3K		63 kotak	42 kotak	21 kotak	Bantuan/Hibah	Pos Nagari	3x24 jam
Terminal listrik	4 lubang	24 pcs	0	24 pcs	Bantuan/Hibah	Pos Nagari	3x24 jam
Piting lampu		60 pcs	0	60 pcs	Bantuan/Hibah	Pos Nagari	3x24 jam
Sepatu bot		70 pcs	56 pcs	14 pcs	Swadaya	Pos Nagari	3x24 jam
Radio HT	Kenwood	56 pcs	42 pcs	14 pcs	Bantuan/Hibah	Pos Nagari	3x24 jam
Toa		14 pcs	7 pcs	7 pcs	Bantuan/Hibah	Pos Nagari	3x24 jam
Air mineral	SMS	240 dus	0	240 dus	Bantuan/Hibah	Pos Nagari	3x24 jam
Pampers/pembalut wanita	Meries/Char m	6 dus	0	14 dus	Bantuan/Hibah	Pos Nagari	3x24 jam
Tali	Marlon	21 gulung	14 gulung	7 gulung	Bantuan/Hibah	Pos Nagari	3x24 jam
Telur	Ayam	120 dus	0	120 dus	Bantuan/Hibah	Pos Nagari	3x24 jam
Beras		1.5 ton	0	1.5 ton	Bantuan/Hibah	Pos Nagari	3x24 jam
Minyak goreng	Sari murni	160 L	0	160 L	Bantuan/Hibah	Pos Nagari	3x24 jam
Mie instan	Indomie	300 kardus	0	300 kardus	Bantuan/Hibah	Pos Nagari	3x24 jam
Gula	Gula tebu	250 kg	0	250 kg	Bantuan/Hibah	Pos Nagari	3x24 jam
Kopi	Sariwangi	100 pack	0	100 pack	Bantuan/Hibah	Pos Nagari	3x24 jam
The	Nur	100 pack	0	100 pack	Bantuan/Hibah	Pos Nagari	3x24 jam
Kuali	Ukuran 40	14 pcs	14 pcs	0	Swadaya	Pos Nagari	3x24 jam
Ember	Ukuran 5L dan 30L	42 pcs	42 pcs	0	Swadaya	Pos Nagari	3x24 jam
Baskom	Ukuran 30L	42 pcs	28 pcs	14 pcs	Bantuan/Hibah	Pos Nagari	3x24 jam
Dandang	Ukuran 40	35 pcs	0	35 pcs	Bantuan/Hibah	Pos Nagari	3x24 jam

<b>Nama Sumberdaya yang Dibutuhkan</b>	<b>Spesifikasi</b>	<b>Dibutuhkan</b>	<b>Dimiliki</b>	<b>Kesenjangan</b>	<b>Metode Pemenuhan Kesenjangan</b>	<b>Lokasi Tujuan Saat Mobilisasi</b>	<b>Waktu Kedatangan yang Dibutuhkan</b>
Gayung	Ukuran 1L	42 pcs	42 pcs	0	Swadaya	Pos Nagari	3x24 jam
Piring	Plastik	1400 pcs	700 pcs	700 pcs	Swadaya	Pos Nagari	3x24 jam
Gelas	Plastik	1400 pcs	700 pcs	700 pcs	Swadaya	Pos Nagari	3x24 jam
Kompore gas	Hock	12 pcs	0	12 pcs	Bantuan/Hibah	Pos Nagari	3x24 jam
Kompore minyak	Hock 40 sumbu	18 pcs	0	18 pcs	Bantuan/Hibah	Pos Nagari	3x24 jam
Tenda DU	Ukuran 6x10 m	21 pcs	14 pcs	7 pcs	Bantuan/Hibah	Pos Nagari	3x24 jam
Terpal		21 pcs	14 pcs	7 pcs	Bantuan/Hibah	Pos Nagari	3x24 jam
Tikar	Kembar 1	42 pcs	28 pcs	14 pcs	Bantuan/Hibah	Pos Nagari	3x24 jam
Genset	Yanmar	14 pcs	0	14 pcs	Bantuan/Hibah	Pos Nagari	3x24 jam
Senter	Panasonic	70 pcs	56 pcs	14 pcs	Bantuan/Hibah	Pos Nagari	3x24 jam
Selimut, kelambu	Lady Rose/Jaring	700 pcs	0	700 pcs	Bantuan/Hibah	Pos Nagari	3x24 jam
Sayur mayur	Kangkong, singkong	700 kg	0	700 kg	Swadaya	Pos Nagari	3x24 jam
Lauk Pauk	Teri/Ikan asin	70 kg	0	70 kg	Swadaya	Pos Nagari	3x24 jam
Cerek/Teko	Ukuran 5L	42 pcs	28 pcs	14 pcs	Swadaya	Pos Nagari	3x24 jam
Pisau, parang	Stainless	28 pcs	7 pcs	21 pcs	Bantuan/Hibah	Pos Nagari	3x24 jam
Susu bayi	SGM	18 dus	0	18 dus	Bantuan/Hibah	Pos Nagari	3x24 jam
Obat nyamuk	Baygon/Autan	6 karton	0	6 karton	Bantuan/Hibah	Pos Nagari	3x24 jam
Perlengkapan sholat	Sarung, mukena sajadah	120 pcs	0	120 pcs	Bantuan/Hibah	Pos Nagari	3x24 jam
Pulpen	Standard	1 kodi	0	0	Bantuan/Hibah	Pos Nagari	3x24 jam
Buku	Bintang Obor	1 kodi	0	0	Bantuan/Hibah	Pos Nagari	3x24 jam
Plastik		6 kg	0	0	Bantuan/Hibah	Pos Nagari	3x24 jam
Pembersih	Mama lemon	18 dus	0	0	Bantuan/Hibah	Pos Nagari	3x24 jam
Sabun cuci	Ekonomi/Daia	18 dus	0	18 dus	Bantuan/Hibah	Pos Nagari	3x24 jam
Sabun mandi	Lifeboy	6 dus	0	6 dus	Bantuan/Hibah	Pos Nagari	3x24 jam
Pasta gigi	Pepsodent	6 dus	0	6 dus	Bantuan/Hibah	Pos Nagari	3x24 jam

Nama Sumberdaya yang Dibutuhkan	Spesifikasi	Dibutuhkan	Dimiliki	Kesenjangan	Metode Pemenuhan Kesenjangan	Lokasi Tujuan Saat Mobilisasi	Waktu Kedatangan yang Dibutuhkan
Sikat gigi	Pepsodent	120 kotak	0	120 kotak	Bantuan/Hibah	Pos Nagari	3x24 jam
Sisir rambut		60 pcs	0	60 pcs	Bantuan/Hibah	Pos Nagari	3x24 jam
Baterai	ABC	14 dus	0	0	Bantuan/Hibah	Pos Nagari	3x24 jam
Radio FM	Panasonic	42 pcs	28 pcs	14 pcs	Bantuan/Hibah	Pos Nagari	3x24 jam
Sendok	Stainless	1400 pcs	700 pcs	700 pcs	Bantuan/Hibah	Pos Nagari	3x24 jam
Rompi	Plastik	70 pcs	56 pcs	14 pcs	Bantuan/Hibah	Pos Nagari	3x24 jam
Lampu LED		56 pcs	42 pcs	14 pcs	Bantuan/Hibah	Pos Nagari	3x24 jam
Kursi roda	Dewasa	36 pcs	10 pcs	26 pcs	Bantuan/Hibah	Pos Nagari	3x24 jam

### 5. Regu Pendataan Cepat

Untuk mendukung pelaksanaan pendataan dan kajian cepat disusun strategi kelompok. Strategi, kebutuhan sumber daya dan pelaku yang terlibat Regu Pendataan Cepat dapat dilihat pada tabel berikut.

**Tabel 22. Sumberdaya Kebutuhan, Kesenjangan dan Mobilisasi Regu Pendataan Cepat**

Nama Sumberdaya yang Dibutuhkan	Spesifikasi	Dibutuhkan	Dimiliki	Kesenjangan	Metode Pemenuhan Kesenjangan	Lokasi Tujuan Saat Mobilisasi	Waktu Kedatangan yang Dibutuhkan
Kertas HVS	Ukuran F4 and A4	25	0	25	Bantuan/Hibah	Pos Nagari	1x24 jam
Plano	Ukuran 40x50	20	0	25	Bantuan/Hibah	Pos Nagari	1x24 jam
Kertas Karton	Ukuran 20x25	15	0	25	Bantuan/Hibah	Pos Nagari	1x24 jam
Pulpen	Pilot	10	0	25	Bantuan/Hibah	Pos Nagari	1x24 jam
Pensil	2B	5	0	25	Bantuan/Hibah	Pos Nagari	1x24 jam
Buku tulis	Bintang obor	7	0	25	Bantuan/Hibah	Pos Nagari	1x24 jam
Sepatu bot		15	0	25	Bantuan/Hibah	Pos Nagari	1x24 jam
Senter	Nasional/ABC	20	0	25	Bantuan/Hibah	Pos Nagari	1x24 jam
Spidol	Permanen	12	0	25	Bantuan/Hibah	Pos Nagari	1x24 jam
Papan informasi	Ukuran 4x3 m	3	0	25	Bantuan/Hibah	Pos Nagari	1x24 jam
Penggaris	Ukuran 30 cm	7	0	25	Bantuan/Hibah	Pos Nagari	1x24 jam
Tas ransel	Water resist	15	0	25	Bantuan/Hibah	Pos Nagari	1x24 jam
Sarung tangan	Kain/karet	120	0	25	Bantuan/Hibah	Pos Nagari	1x24 jam

<b>Nama Sumberdaya yang Dibutuhkan</b>	<b>Spesifikasi</b>	<b>Dibutuhkan</b>	<b>Dimiliki</b>	<b>Kesenjangan</b>	<b>Metode Pemenuhan Kesenjangan</b>	<b>Lokasi Tujuan Saat Mobilisasi</b>	<b>Waktu Kedatangan yang Dibutuhkan</b>
Radio HT	Kenwood	15	0	25	Bantuan/Hibah	Pos Nagari	1x24 jam
Termos air minum	Stainless	25	0	25	Bantuan/Hibah	Pos Nagari	1x24 jam
Helm	SNI	80	0	25	Bantuan/Hibah	Pos Nagari	1x24 jam
Masker		150	0	25	Bantuan/Hibah	Pos Nagari	1x24 jam
Kendaraan motor	Mio/Honda	8	0	25	Bantuan/Hibah	Pos Nagari	1x24 jam
Kalkulator		10	0	25	Bantuan/Hibah	Pos Nagari	1x24 jam

# SISTEM PERINGATAN DINI DAN PROSEDUR TETAP

## A. PENGERTIAN

Seiring meningkatnya intensitas dan frekuensi berbagai ancaman yang terjadi di Indonesia, kesiapsiagaan perlu didorong agar dalam menghadapi situasi darurat masyarakat dapat berperan maksimal sesuai dengan kapasitas dan tanggung jawabnya. Hal ini mengingatkan masyarakat tidak selalu menerima peringatan dini yang dikeluarkan oleh lembaga terkait. Kebijakan pencegahan terlalu penting jika hanya diserahkan kepada pemerintah atau lembaga internasional saja (Kofi Annan, 1999).

Masyarakat diharapkan dapat memanfaatkan sarana yang ada disekitarnya sebagai sumber informasi dan komunikasi. Walaupun sesungguhnya masyarakat telah memiliki pengetahuan dan kearifan lokal tentang gejala alam sebagai tanda-tanda akan terjadinya suatu bencana. Pengetahuan akan gejala alam tersebut sangat diperlukan, karena merupakan salah satu bentuk peringatan dini bagi masyarakat untuk melakukan penyelamatan diri.

Dalam pengantar “Pedoman WMO pada Praktek Pelayanan Cuaca Publik” dinyatakan bahwa peringatan dini hanya apabila diterima, dipahami, dipercaya, dan ditindaklanjuti; maksudnya adalah:

- **Diterima:** Mudah diakses masyarakat termasuk bagi kelompok berisiko dan disabilitas;
- **Dipahami:** Pesan yang disampaikan harus jelas, padat, disajikan sesuai dengan konteks sosial, budaya setempat dan kondisi kebutuhan dan kemampuan masyarakat yang berbeda-beda;
- **Dipercaya:** Pesan dikeluarkan oleh pihak-pihak yang berwenang dan memiliki reputasi yang baik dalam memberikan informasi;
- **Ditindaklanjuti:** Pesan yang diterima dapat digunakan untuk melakukan tindakan aksi yang berguna dalam menghindari maupun mengurangi risiko.

## B. SKEMA PERINGATAN DINI BERBASIS MASYARAKAT

Skema Peringatan Dini berbasis Inklusi dapat dilihat pada gambar dibawah ini:

**Gambar 6. Skema Peringatan Dini Berbasis Masyarakat di Nagari Ampiang Parak**



Berdasarkan skema diatas disusunlah sistem peringatan dini masyarakat mulai dari sistem hulu sampai sistem hilir untuk ancaman bencana yang terjadi. Berikut hasil diskusi dengan Forum PRB beserta pemangku kepentingan lainnya di Nagari Ampiang Parak terkait sistem peringatan dini:

**Tabel 23. Sistem Peringatan Dini Berbasis Masyarakat dan Berprinsip Inklusi di Nagari Ampiang Parak**

<b>Ancaman Bencana Gempa Bumi</b>	
<b>Tanda-Tanda Alam</b>	Burung-Burung terbang tidak biasa, hewan ternak tampak gelisah, melihat awan atau langit, suara gemuruh/getaran, alam terlihat sunyi dan tenang
<b>Sumber Informasi</b>	BMKG/Pusdalops PB Kab. Pesisir Selatan dan pihak lainnya yang berwenang
<b>Penyebaran Arahan</b>	<p>Apabila masyarakat langsung merasakan adanya getaran dan guncangan dari gempa bumi maka masyarakat langsung melakukan tindakan perlindungan dan penyelamatan (<i>Bersimpuh, Berlindung dan Bertahan/Drop, Cover and Hold on</i>)</p> <p>Jika Wali Nagari dan/atau Koordinator Tim PB Nagari mendapatkan informasi peringatan dini dari BMKG/Pusdalops PB Kab. Pesisir Selatan, dan pihak lainnya yang berwenang maka penyebaran arahan peringatan dini tersebut kepada Kepala Kampung dan/atau Koordinator Tim PB Kampung serta Regu Penyuluh (penyebar informasi) di setiap Kampung</p> <p>Kepala kampung dan Koordinator Tim PB dan Regu Penyuluh Tim PB Kampung menyebarkan informasi ke anggota Tim PB di setiap blok kawasan kampung.</p> <p>Anggota Tim PB di setiap blok kawasan kampung menginformasikan kepada anggota keluarga rumah tangga sesuai dengan mekanisme yang sudah ditentukan di setiap blok masing-masing.</p> <p>Bagi anggota masyarakat yang memiliki hambatan dalam penerimaan informasi, maka informasi dari Tim PB disampaikan oleh pendamping, dan/atau anggota, serta tetangga terdekat keluarganya</p> <p>Media yang digunakan untuk penyebaran informasi adalah menggunakan sirine/towa, kentongan, pluit dan radio HT, RIG, dan penyampaian langsung melalui lesan bagi yang terjangkau.</p>
<b>Respon yang diharapkan</b>	<p>Melakukan penyelamatan diri sesuai dengan prosedur penyelamatan diri masing-masing</p> <p>Bagi kelompok masyarakat berisiko dan disabilitas mengalami hambatan dalam melakukan upaya penyelamatan secara mandiri maka pihak pendamping, dan/atau anggota keluarga dapat membantu upaya penyelamatan dengan strategi yang sudah disepakati bersama di setiap rumah tangga.</p>
<b>Ancaman Bencana Tsunami</b>	
<b>Tanda-Tanda Alam</b>	Gempa terjadi lebih dari 1 menit dengan kekuatan getaran yang sangat kuat

<b>Sumber Informasi</b>	BMKG/Pusdalops PB Kab. Pesisir Selatan, dan pihak lainnya yang berwenang
<b>Penyebaran Arahan</b>	Wali Nagari dan/atau Koordinator Tim PB Nagari setelah mendapatkan informasi peringatan dini akan menyebarkan arahan kepada Kepala Kampung dan/atau Koordinator Tim PB Kampung serta Regu Penyuluh (penyebar informasi) di setiap Kampung
	Kepala Kampung dan Koordinator Tim PB dan Regu Penyuluh Tim PB Kampung menyebarkan informasi ke anggota Tim PB di setiap blok kawasan kampung.
	Anggota Tim PB di setiap blok kawasan kampung menginformasikan kepada anggota keluarga rumah tangga sesuai dengan mekanisem yang sudah ditentukan di setiap blok masing-masing.
	Bagi anggota masyarakat yang memiliki hambatan dalam penerimaan informasi, maka informasi dari Tim PB disampaikan oleh pendamping, dan/atau anggota, serta tetangga terdekat keluarganya
	Media yang digunakan untuk penyebaran informasi adalah menggunakan sirine/towa, kentongan, tuddukat, pluit dan radio HT, RIG, dan penyampaian langsung melalui lesan bagi yang terjangkau.
<b>Respon yang diharapkan</b>	Mseluruh masyarakat melakukan penyelamatan diri sesuai dengan prosedur penyelamatan diri masing-masing
	Bagi kelompok masyarakat berisiko dan disabilitas mengalami hambatan dalam melakukan upaya penyelamatan dan evakuasi secara mandiri maka pihak pendamping, dan/atau anggota keluarga, tetangga terdekat dan Tim PB terdekat dapat membantu upaya penyelamatan dengan strategi yang sudah disepakati bersama di setiap rumah tangga, dan diupayakan jika dimungkinkan untuk membawa alat bantu yang digunakan oleh disabilitas masing-masing.

### C. PROSEDUR TETAP GEMPA BUMI BERPOTENSI TSUNAMI

Prosedur tetap yang disusun ini difokuskan untuk bencana gempa bumi berpotensi tsunami. Sedangkan untuk jenis bencana alam lainnya, prosedur menyesuaikan dengan potensi ancaman yang akan terjadi.

**Tabel 24. Prosedur Tetap Tindakan Pengurangan Risiko Dampak Ancaman Bencana Gempa Bumi Berpotensi Tsunami di Nagari Ampiang Parak**

<b>GEMPA BERPOTENSI TSUNAMI</b>	
<b>KONDISI</b>	<b>: TERJADI GEMPA KUAT LEBIH DARI 1 MENIT</b>
Maka,	: Melakukan penyelamatan diri
Seluruh masyarakat Nagari Ampiang Parak	: Saat gempa terjadi semua masyarakat yang berada dalam ruangan disarankan untuk melakukan 3B (berlutut, berlindung dan bertahan) untuk meminimalisir timbulnya korban akibat gempa yang terjadi
<b>KONDISI</b>	<b>: SAAT GEMPA REDA/TELAH BERHENTI</b>
Maka,	: Semua masyarakat disarankan untuk melakukan evakuasi
Seluruh masyarakat Nagari Ampiang Parak	: Melakukan evakuasi mandiri ke tempat aman melalui jalur evakuasi yang sudah disepakati
	: Bagi masyarakat yang berada diruangan/rumah, disarankan setelah melakukan 3B dilanjutkan untuk mengevakuasi diri dengan tidak BBMK (Berlari, Berisik, Mendorong, dan Kembali)
	: Masyarakat diarahkan untuk melakukan evakuasi ke Tempat Evakuasi Sementara (TES) dan Tempat Evakuasi Akhir (TEA) yang sudah ditentukan
	: Masyarakat disarankan melakukan evakuasi dengan membawa tas siaga bencana
Masyarakat yang memiliki anggota keluarga disabilitas	: Dampingi anggota keluarga disabilitas dalam melakukan tindakan BBMK
Tim PB Nagari dan Tim PB Kampung	: Memandu dan membantu masyarakat menuju jalur evakuasi dan tempat evakuasi sementara
<b>KONDISI</b>	<b>: AKTIVASI SISTEM PERINGATAN DINI</b>
Maka,	: Segera mengaktifkan sistem peringatan dini setelah informasi kegempaan dan potensi tsunami didapatkan dari BMKG dan Pusdalops BPBD Kab. Pesisir Selatan
Wali Nagari Ampiang Parak	: Mengaktifkan struktur koordinasi tanggap darurat Nagari Ampiang Parak dengan aktivasi Tim PB Nagari Ampiang Parak beserta perangkat tim
Ketua Tim PB Nagari Ampiang Parak	: Mengaktifkan seluruh perangkat dan regu-regu Tim PB Nagari Ampiang Parak dan Tim PB Kampung
	: Menginstruksikan koordinator Regu Penyuluh dan Komunikasi untuk mengumpulkan informasi terkait kegempaan dan potensi tsunami yang terjadi
	: Menginstruksikan Koordinator Regu SAR untuk memastikan semua masyarakat sudah melakukan evakuasi dan berada di TES atau TEA
	: Menginstruksikan Koordinator Regu Pendataan Cepat untuk mempersiapkan segala kebutuhan untuk melakukan pendataan yang dimulai dengan mendata masyarakat yang evakuasi dan dipengungsian

	: Menginstruksikan Koordinator Regu PPGD untuk mempersiapkan segala kebutuhan untuk pelayanan kesehatan dan pertolongan pertama
	: Menginstruksikan Koordinator Regu Logistik dan Dapur Umum untuk mempersiapkan segala kebutuhan untuk pengadaan tenda, logistik dan pendirian Dapur Umum
Koordinator Regu Penyuluh dan Komunikasi	: Menyampaikan himbauan informasi yang telah didapat dari BMKG dan Pusdalops BPBD Kab. Pesisir Selatan kepada Ketua Tim PB Nagari Ampiang Parak dan Wali Nagari Ampiang Parak kemudian disebar kepada seluruh anggota tim PB Nagari Ampiang Parak dan tim PB Kampung menggunakan Radio HT/RIG, Toa dan disalin ke papan informasi di pos koordinasi
Koordinator Regu SAR	: Membunyikan kentongan/sirine/pluit untuk mengarahkan masyarakat yang melakukan evakuasi
Tim PB Nagari dan Tim PB Kampung	: Membantu masyarakat menuju tempat evakuasi akhir termasuk kelompok berisiko tinggi
Info Gempa	: Gempa Mag. 8,8 SR Pukul 02.00 WIB lokasi 1,48°LS, 99°26BT (37km timur laut Kabupaten Kepulauan Mentawai dengan kedalaman 15 km berpotensi Tsunami) sumber : BMKG
Himbauan Informasi	: Berdasarkan informasi gempa yang terjadi dihimbau kepada masyarakat agar selalu waspada dan berada di zona aman. Jangan mendekati wilayah pantai sampai ada informasi pernyataan aman oleh pihak berwenang
<b>KONDISI</b>	<b>: SAAT BERADA DI TEMPAT EVAKUASI</b>
Maka,	: Melakukan manajemen dan koordinasi untuk upaya tanggap darurat pasca gempa dan tsunami
Wali Nagari Ampiang Parak	: Melakukan koordinasi dengan Tim PB Nagari Ampiang Parak untuk mengetahui perkembangan situasi dan kondisi pasca gempa berpotensi tsunami yang terjadi di Nagari Ampiang Parak
Ketua Tim PB Nagari Ampiang Parak	: Koordinasi dengan semua koordinator Regu Tim PB Nagari Ampiang Parak untuk mengetahui kesiapan dan perkembangan situasi dan kondisi pasca gempa berpotensi tsunami yang terjadi di Nagari Ampiang Parak
	: Menginstruksikan kepada semua koordinator Regu Tim PB Nagari Ampiang Parak untuk melakukan koordinasi dengan semua Tim PB Kampung untuk mendapatkan informasi tentang jumlah pengungsi, data korban, upaya pertolongan pertama, kebutuhan logistik dan dapur umum dan kebutuhan pencarian dan evakuasi.
	: Koordinasi secara insentif dengan Pusdalops BPBD, instansi/lembaga kebencanaan lainnya terkait bencana yang terjadi
	: Menyampaikan setiap laporan dan kondisi di lapangan atau setiap informasi yang terjadi kepada Wali Nagari Ampiang Parak
Humas	: Koordinasi dengan Wali Nagari Ampiang Parak dan Ketua tim PB Nagari Ampiang Parak untuk mendapatkan perkembangan situasi dan kondisi
	: Membantu Tim PB Kampung melakukan upaya tanggap darurat terutama dalam menyampaikan perkembangan informasi kepada seluruh masyarakat di masing-masing Kampung
Tim PB Kampung	: Melakukan upaya tanggap darurat berdasarkan tugas tiap regu dimasing-masing Kampung
Masyarakat	: Diminta untuk tetap tenang dan waspada sembari menunggu informasi perkembangan situasi dan kondisi

	:	Menunggu bantuan dari Tim PB Nagari Ampiang Parak dan Tim PB Kampung serta Pusdalops BPBD
<b>KONDISI</b>	:	<b>SAAT LANDAAN TSUNAMI BERAKHIR</b>
Maka,	:	Melakukan upaya tanggap darurat secara insentif dan terkoordinir
Wali Nagari Ampiang Parak	:	Menjadi koordinator Umum dalam upaya tanggap darurat di Nagari Ampiang Parak
Ketua Tim PB Nagari Ampiang Parak	:	Koordinasi dengan Pusdalops BPBD terkait informasi pengakhiran landaan tsunami
	:	Menginstruksikan koordinator regu penyuluh dan komunikasi Tim PB Nagari Ampiang Parak untuk menyampaikan informasi tentang pengakhiran landaan kepada semua pihak dan masyarakat
Koordinator Regu Penyuluh dan Komunikasi Tim PB Nagari Ampiang Parak	:	Menyampaikan informasi tentang pengakhiran landaan dan meminta agar masyarakat untuk tetap bertahan sampai situasi dan kondisi benar-benar aman
Seluruh Koordinator Regu dan Anggota Tim PB Kampung	:	Melaksanakan operasi tanggap darurat berdasarkan tugas tiap regu dimasing-masing Kampung bersama instansi/lembaga kebencanaan lainnya di Nagari Ampiang Parak
	:	Operasi tanggap darurat di Nagari Ampiang Parak sifatnya sementara dan menunggu hingga dikeluarkan status tanggap darurat oleh pemerintah kabupaten/provinsi/nasional
Masyarakat	:	Tetap bertahan di tempat evakuasi sampai kondisi aman

## VI

# PEMANTAUAN DAN RENCANA TINDAK LANJUT

Rencana Kontinjensi Ancaman Bencana Gempa bumi Berpotensi Tsunami ini disusun secara bersama oleh Pemerintah Nagari dan Forum PRB Nagari Ampiang Parak, dengan melibatkan perwakilan Tim PB Nagari Ampiang Parak dan perwakilan organisasi masyarakat serta perwakilan masyarakat dari berbagai sektor termasuk juga perwakilan dari kelompok berisiko dan disabilitas, pada situasi dan kondisi kejadian bencana yang telah di sepakati. Rencana Kontinjensi ini telah mengacu kepada skenario Rencana Kontinjensi Ancaman Bencana Gempabumi Berpotensi Tsunami Kabupaten Pesisir Selatan dan Provinsi Sumatera Barat.

Pengesahan proses penyusunan Rencana Kontinjensi sebagai dokumen resmi (dokumen Nagari), perlu ditindak lanjuti untuk memaksimalkan upaya kesiapsiagaan bencana. Langkah-langkah dalam tindak lanjut tersebut mencakup hal sebagai berikut:

1. Dalam hal ini dituntut peran aktif dari masing-masing kelompok, disamping diperlukan koordinasi dan kerja sama yang baik.
2. Untuk menguji ketepatan Rencana Kontinjensi yang dibuat, maka perlu dilakukan uji coba dalam bentuk simulasi atau gladi. Dalam gladi ini diusahakan supaya besaran dan skalanya mendekati peristiwa/kejadian yang di-skenario-kan. Apabila tidak memungkinkan, dapat diambil sebagian dari luas yang sesungguhnya.
3. Pemerintah dan masyarakat serta pihak-pihak terkait bersama-sama mengupayakan pemenuhan kesenjangan kebutuhan.
4. Menyusun rencana penanganan kedaruratan bencana yang sifatnya dapat mendukung pelaksanaan/aktivasi rencana Kontinjensi yang telah disusun.
5. Melakukan pemantauan secara periodik terhadap ancaman dan peringatan dini beserta diseminasinya.
6. Jika dalam 2 (dua) tahun setelah dokumen ini disusun dan disahkan tidak terjadi bencana gempa bumi yang berpotensi tsunami, maka harus dilakukan kaji ulang dan pemutakhiran data, informasi dan kondisi kebencanaan guna penyesuaian Rencana Kontinjensi.

## VII PENUTUP

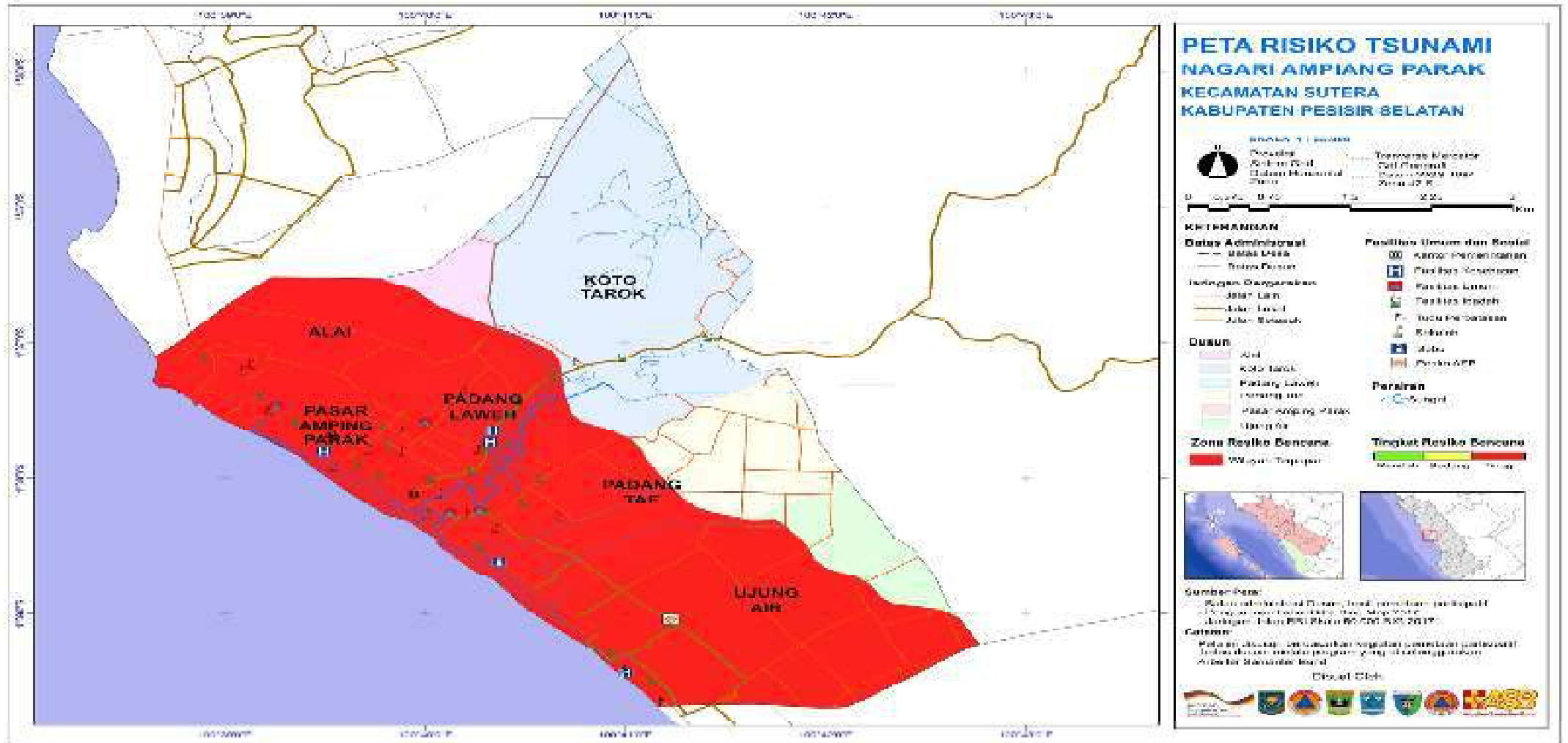
Dalam hal terjadi bencana, maka rencana Kontinjensi dengan sendirinya berubah menjadi rencana operasi dengan merubah skenario kejadian menjadi skenario berdasarkan kejadian yang sebenarnya untuk memudahkan dalam pelaksanaan operasi tanggap darurat (dalam hal bencana benar-benar terjadi).

Demikian Rencana Kontinjensi ini dibuat sebagai bahan masukan bagi seluruh pemangku kepentingan ditingkat Nagari terkait penanggulangan bencana sebagai pedoman untuk menentukan kebijakan lebih lanjut. Kami menyadari bahwa rencana Kontinjensi ini masih perlu penyempurnaan dan peninjauan secara berkala untuk mengaktualkan data yang ada.



Lampiran II

Gambar 13. Peta Risiko Ancaman Tsunami Nagari Ampiang Parak



Dokumen Rencana Kontijensi Gempa Bumi Berpotensi Tsunami  
Nagari Ampiang Parak



**NAGARI AMPING PARAK  
KECAMATAN SUTERA  
KABUPATEN PESISIR SELATAN**

**Disusun oleh:  
Pemerintah Nagari Amping Parak,  
Forum Pengurangan Risiko Bencana,  
Tim Penanggulangan Bencana  
Perwakilan Masyarakat**

**Didukung oleh:**

